

**PERANAN PAMONG DESA DALAM "PROYEK TANI MAKMUR"**

**DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 1968-1980**

**(Studi Masyarakat Desa di Kecamatan Delanggu dalam Penggunaan Bibit Padi)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Sastra dan Seni Rupa  
Jurusan Ilmu Sejarah**

**Oleh :**

**YULI PURWANTO  
NIM. C 0596064**

**FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2003**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret

Pada Tanggal : 17 Februari 2003

### **Pembimbing I**

**Drs. Sri Agus, M.Pd**

(.....)

**NIP. 131 633 901**

### **Pembimbing II**

**Drs. Suhardi, M.A**

(.....)

**NIP. 131 792 938**

## HALAMAN PENGESAHAN

Diterima dan disyahkan oleh Panitia Penguji

Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Tanggal :      Februari 2003

Panitia Penguji :

Drs. Buchari S  
Ketua

(.....)  
NIP. 130 676 863

Drs. Suharyana, M.Pd  
Sekretaris

(.....)  
NIP. 131 642 902

Drs. Sri Agus, M.Pd  
Penguji I

(.....)  
NIP. 131 633 901

Drs. Suhardi, M.A  
Penguji II

(.....)  
NIP. 131 792 938

Dekan  
Fakultas Sastra dan Seni Rupa  
Universitas Sebelas Maret

Dr. Maryono Dwirahardjo, S.U  
NIP. 130 675 167

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

Hidup adalah perjuangan panjang, perjuangan membutuhkan kesabaran.

Kesabaran adalah inti hidup. Sabar akan mewujudkan hasil yang baik.

Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

(penulis)

### **Kupersembahkan :**

Bapak (alm), Ibu dan saudara-saudaraku

(Mbak Tanti, Mbak wiwik dan adiku Sakti dan

keluarga besar Amad Rusdi dan Djojo Sentono

serta almamaterku tercinta.

## KATA PENGANTAR

Beribu-ribu doa penulis panjatkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah atas diri Rosulullah, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran bagi seluruh umat-Nya.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini juga berkat bimbingan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itulah pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret beserta staffnya, Bapak Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si selaku Ketua Jurusan Sejarah, dan Bapak Drs. Sri Agus, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan juga selaku pembimbing I, serta Bapak Drs. Suhardi, M.A selaku pembimbing II yang telah memberi arahan, bimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Pamong Desa, pegawai BPP Kecamatan Delanggu dan pegawai BPIP serta Dinas Pertanian Kabupaten Klaten atas informasi dan petunjuk dari instansi terkait, sehingga penulis memperoleh, dokumen, data penelitian yang diperlukan. Terutama kepada Ir. Hadi Soetomo yang telah memberikan arahan dan petunjuk dokumen penelitian yang diperlukan dan para petani serta masyarakat desa di Kecamatan Delanggu.

3. Keluargaku, semua keponakan dan kerabat dekat : Mas Agus di Sragen, Mas Suroto di Jakarta, Mas Latief dan Mas Yuwono di Semarang, Mas Qollil M di Surabaya, serta Mbokde-Pakdeku yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman mahasiswa Sejarah UNS angkatan 96 : Indri, Dibyo W, Mulyoto, Dyah Kumala, Umi Yuliati di Jogja, Bambang, Aris S, M. Nurul K, Sunu A.S, Andri K, Madyana dan semuanya dimana penulis tidak dapat menyebutnya satu-persatu atas dorongan dan dukungannya agar penulis tetap selalu menyelesaikan skripsi ini, walaupun harus dengan kesabaran dan ketekunan yang tinggi.
5. Semua rekan-rekan karang taruna “DERMEGA” yang selalu memperhatikan penulis dan terutama buat Ayu P.Dewi, Rohmah Dian Prasetyo Dewi, Mulyono, Harun, Atik, Endah, Fitri Astuti, bersama mereka penulis selalu mendapat perhatian khusus dan doa dengan tulus.
6. Penghuni WM. Handayani : Keluarga Bp. Bunari Siswo W, bersama “Team Adventurnya” (Andi, Suheri, Andi Candra, Sarjono, Teguh, Agus T.J, Joko S, Noeroso) bersama mereka penulis dapat mengurangi rasa kejenuhan, terutama Zaenuri atas fasilitas kamar dan computernya dalam pengetikan skripsi ini.

Terima kasih banyak juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam bentuk apapun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, dimana penulis akan menerima dengan keikhlasan yang sebesar-besarnya demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis serta siapa saja yang membaca dan memerlukannya.

Surakarta, Februari 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....	18
A. Letak dan Keadaan Topografi .....	18
B. Struktur Penduduk Masyarakat Pedesaan .....	21



C. Potensi Lahan dan Keadaan Irigasi .....	25
D. Penggunaan Teknologi dalam Pelaksanaan Usaha Tani Padi .....	27
1. Teknologi Hayati Kimiai .....	28
2. Teknologi Mekanik Pertanian .....	33
E. Pola Umum Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan .....	34
BAB III. Kepemimpinan Pamong Desa dalam Pertanian .....	37
A. Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten .....	37
B. Kepemimpinan Desa dalam Masyarakat di Bidang Pertanian .....	44
C. Proyek Pertanian Tani Makmur dalam Peningkatan Produksi Padi....	49
D. Usaha-Usaha dalam Peningkatan Produksi Padi .....	58
1. Pihak Pemerintah Desa .....	59
2. Pihak pemerintah dari Pusat.....	63
BAB IV. Keberadaan Pamong Desa dalam Proyek Tani Makmur .....	67
A. Pemerintahan Desa sebagai Legitimasi Kebijakan Pemerintah Pusat	67
B. Ikatan Sosial Pamong Desa dengan Masyarakat Desa .....	83
C. Tanggapan Petani terhadap Proyek Tani Makmur .....	91
1. Sikap positif petani dalam penggunaan bibit padi jenis baru.....	93
2. Sikap negatif petani dalam penggunaan bibit padi jenis baru.....	94
BAB V. Penutup .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103
DAFTAR INFORMAN .....	106
LAMPIRAN .....	109

## DAFTAR TABEL dan BAGAN

TABEL :	Halaman
Tabel II.1      Luas Wilayah Menurut Tanah Sawah, Tanah Kering Tiap Desa Di Kec. Delanggu Tahun 1980.....	20
Tabel II.2      Prosentase Mata Pencanharian Penduduk Kec. Delanggu Tahun 1971.....	22
Table II.3      Penduduk Warga Negara Indonesia Daerah Kec. Delanggu, Menurut Dewasa/Anak, Jenis Kelamin, Pada Akhir Tahun 1974.....	22
Tabel II.4      Jumlah Penduduk Dalam Daerah Kec. Delanggu Diperinci Perdesa, Mulai tahun 1977-1983. ....	23
Table II.5      Daftar Buku Tanah Oncoran, Tadahan dan Tegalan, Seksi Pengairan Kab. Klaten Tahun 1970 Tiap Ranting .....	26
Table II.6      Produksi Pupuk Dalam Negeri Tahun 1974-1979.....	31
Table III.1     Pembiayaan Usaha Peningkatan Produksi Padi Di Klaten Tahun 1968. ....	50
Table III.2     Tata Guna Tanah Di Kab. Klaten Tahun 1971.....	51
Table III.3     Penggunaan Sarana Produksi 1968/69 sampai 1970/71.....	52
Table III.4     Paket Kredit PerHektar Lahan Garapan Dalam Tahun 1970/71. ....	55

Table III.5	Luas Panen Padi yang Berhasil dan Produksi Padi Di Kabupaten Klaten 1968/79. ....	57
Table IV.1	Jumlah Bantuan dan Realisasi Bantuan Desa di Seluruh Indonesia. ....	73

**GAMBAR BAGAN :**

Bagan III.1	Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Dan Perangkat Desa Menurut UU No. 5 Tahun 1979. ....	39
Bagan III.2	Bagan Struktur Tata Pemerintahan desa, Menurut UU No. 5 Tahun 1979. ....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
I. Daftar Informan.....	106
II. Surat Ijin Riset .....	109
III. Peta Pembagian Tanah di Kabupaten Klaten.....	111
IV. Peta Wilayah Kecamatan Delanggu.....	112
V. Laporan Bupati Klaten Tentang Pembangunan Daerah tanggal 5 Mei 1969.....	113
VI. Laporan Kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Rakyat. ....	126
VII. Daftar Penyalur Pedagang Benih Padi. ....	129
VIII. Jenis-jenis Varietas Padi.....	130
IX. Daftar Kerusakan (Puso) Tanaman Tahun 1976-1980.....	133
X. Persediaan, Penyaluran dan Sisa Insektisida Tahun 1976-1981.....	134
XI. Turunan Surat Dinas Kepala Dipertan.Klaten .....	135

## ABSTRAK

**Yuli Purwanto, (2003). Peranan Pamong Desa Dalam “Proyek Tani Makmur” Di Kabupaten Klaten Tahun 1968-1980. (Studi masyarakat desa di Kecamatan Delanggu dalam penggunaan bibit padi).** Skripsi, Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pokok pembahasan penulisan skripsi ini adalah peranan pejabat pemerintahan desa yang disebut pamong desa dengan latar belakang kemerosotan produksi beras nasional, perkembangan teknologi dan kebijakan pertanian, serta respon petani dalam penggunaan bibit padi jenis baru di pedesaan dalam meningkatkan produksi beras untuk mencapai swasembada pangan. Kebijakan pertanian melalui instansi pemerintahan, dimana proses dan bentuk kebijakan pertanian oleh pejabat pemerintahan merupakan tujuan adanya penelitian ini.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis, mencakup empat tahap. Pertama yaitu heuristik, proses pengumpulan sumber data. Kedua, melakukan kritik intern dan ekstern. Ketiga, sintesa yaitu mencari hubungan fakta yang relevan dengan bantuan imajinasi dan interpretasi, kemudian dilakukan analisa diskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan sosiologi yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi dan perkembangan pertanian padi. Keempat, historiografi penulisan kembali suatu peristiwa sejarah.

Masyarakat pedesaan di Kabupaten Klaten antara tahun 1968-1980 berada dalam masa transisi, hal tersebut dapat digambarkan pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Delanggu. Selama kurun waktu itu terjadi proses perubahan dalam usaha tani yaitu dengan perubahan penggunaan bibit padi lokal pada jenis padi unggul baru berskala nasional. Hal ini didorong oleh faktor-faktor khusus, misalnya adanya himbauan, arahan, instruksi secara langsung maupun tidak langsung dari pihak pemerintah melalui pejabatnya. Kebijakan menuntut keberadaan para pejabat terutama para pamong desa yang secara langsung berhubungan dengan petani, agar dapat menempatkan posisi hierarki mereka secara baik dan tepat sesuai tugas dan fungsinya. Namun demikian, berhasilnya suatu proyek pertanian untuk mewujudkan *Tani Makmur* juga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak di luar struktur birokrasi atau instansi pemerintahan. Dukungan tersebut berasal dari badan atau lembaga baik secara resmi maupun tidak resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat sendiri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pamong desa memiliki ikatan khusus dengan masyarakat petani, program tersebut terdapat berbagai keberhasilan dan tanggapan masyarakat, dari pelaku kebijakan di bidang pertanian. Keberhasilan program, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan meskipun melalui proses cukup panjang untuk mendorong petani lebih bersikap rasional. Selain itu juga terdapat respons dari masyarakat. Responsnya berupa tanggapan positif dan negatif yang membutuhkan perencanaan lebih matang, program, cara, sistem dari proyek yang akan dilakukan oleh pembuat kebijakan. Hal ini mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat di pedesaan pada umumnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertanian merupakan bidang kajian yang sangat perlu dipelajari, karena pertanian merupakan pokok kehidupan masyarakat negara agraris seperti di Indonesia, dimana kurang lebih 70 % penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian bercocok tanam atau sebagai petani. Sedangkan dalam kenyataannya pada akhir tahun 1960-an Indonesia mengalami penurunan produktifitas pertanian terutama padi. Hal ini wajar apabila kebijakan pembangunan negara menitikberatkan pada bidang pertanian dalam Repelita I dan seterusnya. Kebijakan ini tidak terlepas dari bidang lainnya seperti ; bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya pada masa awal pemerintahan Soeharto atau awal *Orde Baru*.

Pembangunan di bidang pertanian dilakukan dalam berbagai tahapan, salah satu tahapan yaitu pengenalan program terhadap masyarakat yang bersangkutan. Tahapan ini biasanya dilakukan dengan proyek-proyek pengenalan atau percontohan sering disebut dengan *pilot project* di berbagai daerah pertanian. Daerah pertanian sebagai penghasil bahan pangan pokok atau beras sebagian besar teradapat di pulau Jawa, khususnya di daerah pedalaman misalnya; Klaten, Demak, Purworejo, Sragen, Surakarta, dan sebagainya. Sejak tahun 1968 pemerintah Jerman Barat telah mensponsori pengembangan produksi pertanian dengan proyek intensifikasi antara lain,

intensifikasi produksi kelapa sawit di Sumatera Utara, intensifikasi padi di Tanah Datar Sumatera Barat, dan intensifikasi padi di Klaten Jawa Tengah.<sup>1</sup>

Intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi padi di Klaten Jawa Tengah dilakukan karena daerah ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satu daerah pertanian yang berpotensi baik di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Delanggu, dimana daerah tersebut memiliki lahan pertanian luas dengan didukung adanya saluran irigasi yang baik dan teratur. Lahan pertanian tersebut merupakan lahan yang cocok dengan adanya perubahan baru, sehingga merupakan tolok ukur pertanian di daerah sekitarnya serta merupakan penyokong bahan pangan beras se-Kabupaten Klaten.<sup>2</sup> Selain itu daerah tersebut merupakan perpaduan kebudayaan antara masyarakat tradisional yang masih menganut budaya tradisional (pengaruh budaya keraton) dengan masyarakat maju (modern) yang telah memperoleh pendidikan dan pengetahuan baik secara formal maupun informal. Diantara budaya tersebut antara lain masyarakat yang masih menggunakan budaya *patron and client* atau *majikan-buruh* atau *bapak-anak*, yang masih berlaku dan digunakan, sehingga hal ini merupakan potensi yang baik untuk di kaji.

Kebijakan pembangunan masyarakat desa meliputi berbagai sektor dan program yang dilaksanakan oleh aparat departemen ataupun instansi pemerintahan. Adapun pelaksanaan serta pelayanannya lebih banyak

---

<sup>1</sup> Karl H. W Bechtold , *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1988, hal 72.

<sup>2</sup> Wawancara, *Soemarno Mulyo P*, mantan Kades Butuhan Kec Delanggu, periode 1972-1998, tanggal 16 September 2001.

memanfaatkan institusi dari pedesaan itu sendiri. Institusi tersebut adalah birokrasi atau instansi pemerintahan paling bawah yaitu pemerintah desa. Dalam hal ini aparturnya sering disebut dengan *pamong desa*, merupakan kunci atau tulang punggung keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah pusat melalui badan atau lembaga pada daerah pedesaan.

Pamong Desa terdiri dari kepala desa (lurah desa), yang dibantu oleh bawahnya yaitu sekretaris desa (carik), kepala dusun (bayan), kaur pemerintahan (ulu-ulu), kaur keagamaan (modin), kaur kesejahteraan dan pembangunan atau sekarang disebut PTD (Pamong Tani Desa). Dalam kegiatan ini kepala desalah yang bertugas sebagai koordinator dari berbagai program yang dilakukan. Keberadaan dan peranan pamong desa sangatlah besar, karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat petani. Sedangkan pejabat lain ditingkat atasnya tidak banyak berhubungan langsung dengan keberadaan petani. Selain itu, keberadaan pamong desa sendiri merupakan simbol dari kepemimpinan tradisional, dalam arti keberhasilan dari suatu program atau perkembangan suatu desa sangatlah tergantung pada pemimpin.

Kebijakan pembangunan pertanian hubungan antara masyarakat pedesaan sebagai petani dengan aparatur desa atau pamong desa sangatlah erat seperti hubungan antara *bapak-anak* dalam sebuah keluarga atau hubungan *patron and client*, dalam sebuah perusahaan dimana pengusaha membutuhkan pekerja atau buruh dimana mereka saling bergantung satu sama lain. Pelaksanaan daripada proyek percontohan pertanian dengan



masuknya produk-produk baru dari luar daerah atau jenis-jenis lama yang telah mengalami perbaikan atau inovasi dengan dilakukan penelitian. Jenis padi produk baru tersebut agak berbeda dengan jenis bibit padi lama yang digunakan oleh petani. Sebagian besar masyarakat biasa menyebut jenis padi lokal sebagai jenis padi tradisional. Jenis padi tradisional memiliki masa tanam yang cukup lama dan hasil produktifitasnya rendah. Hal ini diperlukan kemampuan, keterampilan untuk meningkatkan produktifitas padi oleh pelaku pertanian persawahan. Pelaku pertanian di pedesaan sebagian besar belum mempunyai keahlian dan hubungan yang luas. Mereka memerlukan unsur yang dapat memberikan masukan kepada petani untuk memperoleh pengetahuan tentang pertanian. Pemimpin merekalah yang dianggap oleh para petani sebagai elite pedesaan sebagai motifator penggeraknya. Motifator masyarakat desa diantaranya adalah pamong desa yang dianggap mampu untuk melakukan perubahan. Jadi pamong desa sebagai pemimpin pedesaan merupakan unsur pengubah (*agent of change*) bagi masyarakat desa. Peranan pamong desa dalam bidang pertanian memungkinkan membawa pengaruh ataupun mempengaruhi petani untuk melakukan kebijakan di bidang pertanian.

Pengaruh pamong desa terlihat di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan budaya bahkan juga nampak di bidang politik. Proyek pertanian “Tani Makmur” yang berada di Kabupaten Klaten, sebagai bagian dari kebijakan pertanian dari pemerintah pusat ditujukan untuk meningkatkan produktifitas dan mutu beras serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Program kebijakan pertanian ini dilaksanakan dengan melalui penggunaan bibit-bibit padi baru yang mempunyai produktifitas tinggi yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan lembaga penelitian seperti IRRI di Fillipina dan Lembaga Pusat Penelitian Padi di Bogor.

Kendati telah banyak dilakukan penelitian masalah pertanian, akan tetapi masih bersifat umum, belum memfokuskan secara khusus, terutama pada awal dimulainya pertanian yaitu proses pembibitan pertanian padi pada lahan persawahan tanah basah yang terjadi pada masa tahun 1968-1983.

## **B. Perumusan Masalah**

Penulis pertama-tama akan mengemukakan penjelasan istilah dan konsep-konsep serta batasan masalah sebagai berikut :

Pertanian dalam penulian ini merupakan usaha yang dilakukan manusia dalam menggunakan dan mengolah tanah dengan maksud untuk memperoleh hasil dari tanaman tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya.<sup>3</sup> Disini penulis membatasi pada pertanian tanah persawahan atau tanah basah, karena nampak jelas bahwa pada daerah penelitian mayoritas berupa lahan pertanian terdiri dari tanah persawahan, dengan luas wilayah 80% berupa sawah tanah basah, 15 % tanah perkebunan, dan 5 % tanah tegalan (tanah kering/tidak teririgasi). Tanah persawahan dalam penelitian ini adalah proses pertanian dengan menggunakan jenis-jenis padi baru untuk memperoleh hasil panen tinggi

---

<sup>3</sup> Anwar Adilogo, *Kaum Usaha Tani*. Bandung: Alumni, 1976, hal 12.

sesuai rencana yang telah diprogramkan oleh pemerintah Indonesia melalui Dinas Pertanian untuk mencapai swasembada pangan nasional.

Yang dimaksud proyek pertanian “Tani Makmur” adalah suatu kebijakan pemerintah pada bidang pertanian melalui Departemen Pertanian dan badan Bimas dan Inmas yang dibentuk pemerintah. Adapun bentuk dan nama program pembangunan pertanian dalam Proyek Bimas baru di Kabupaten Klaten dinamakan Tani Makmur, proyek Hiba Tani di daerah Magelang, proyek Kopa Tani di daerah pesisir pantai utara Jawa pada tahun 70an yang disponsori dan kerjasama dengan pemerintahan Jerman Barat. Selain itu juga dengan dibentuknya lembaga yang berhubungan dengan pertanian seperti BUUD (Badan Usaha Unit Desa), KUD (Koperasi Unit Desa), BPMD (Balai Pembangunan Masyarakat Desa, dirubah menjadi BPP (Badan Penyuluh Pertanian) pada tahun 1977) untuk mendukung program pembangunan pertanian tersebut. Kebijakan pemerintah bidang pertanian ini dilakukan karena pada kurun waktu tahun 1950 sampai akhir tahun 1960 Indonesia mengalami kemerosotan perekonomian dan produktifitas bahan pangan beras rendah.

Yang dimaksud peranan pamong desa adalah peranan dari pamong desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa (*carik*), kepala dusun (*bayan*), *modin* dan perangkat lain seperti PTD (Pamong Tani Desa), terhadap bidang pertanian sangatlah besar. Perlu diketahui bahwa kekuasaan desa dilakukan oleh kepala desa dibantu oleh beberapa orang yang telah ditunjuk, bersama-sama kepala desa menjalankan tugas dalam pemerintahan desa.

Pemerintahan desa mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit, pemerintah desa adalah kepala desa. Untuk arti luas lebih cenderung dan tepat serta untuk menghindari salah faham kiranya dipergunakan istilah “*pamong desa*”.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaan pembangunan Pamong desa adalah *bopo babuning rakyat* atau *patron and client* dalam berhadapan dengan rakyat artinya ikut serta menderita dan dalam kegembiraan. Jadi pamong desa adalah mempunyai fungsi memimpin dalam bahasa Jawanya *momong* rakyat secara langsung. Mereka sangat berperan besar, karena mereka berhubungan secara langsung maupun tidak langsung kepada petani di pedesaan. Mereka merupakan ujung tombak berhasilnya program pemerintah yang diinstruksikan melalui lembaga pemerintah baik dari pusat maupun daerah.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses dan bentuk proyek pertanian Tani Makmur dalam penggunaan bibit padi jenis baru ?
2. Bagaimana peranan Pamong Desa dalam proyek pertanian tersebut terhadap masyarakat pedesaan di Kecamatan Delanggu ?
3. Bagaimana tanggapan petani dalam pelaksanaan proyek pertanian tersebut terhadap kehidupan masyarakat petani ?

---

<sup>4</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Dan Administrasi Desa*. Jakarta: Yayasan Beringin Korpri Unit Departemen Dalam Negeri, 1981, hal 69.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses dan bentuk program proyek pertanian dalam penggunaan bibit padi jenis baru yang dilakukan oleh petani atas kebijakan pemerintah Indonesia melalui instansi pemerintahan yang paling bawah yang tak lepas dari hubungannya dengan Departemen Pertanian maupun Dinas Pertanian sebagai lembaga yang berperan penting dalam pemenuhan bahan makanan pokok.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan dan pengaruh Pamong Desa terhadap kehidupan masyarakat petani di pedesaan daerah Kabupaten Klaten umumnya dan Delanggu pada khususnya.
3. Untuk mengetahui tanggapan petani terhadap proyek pertanian “Tani Makmur” terhadap petani dan masyarakat pedesaan akibat penerapan kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai swa sembada pangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai gambaran sejarah pedesaan bidang pertanian dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, terutama sejarah pertanian, dimana sebagian besar penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan sebagai petani.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pembaca dan masyarakat pedesaan terutama petani dalam menerima, mengadakan suatu kebijakan-kebijakan dari maupun ke instansi-instansi atau badan atau lembaga dan sebagainya.

## E. Kajian Pustaka

Literatur-literatur pendukung sangat diperlukan dalam kajian ini, maka penulis menggunakan pustaka-pustaka yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.

Pertama dalam buku *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*, karangan Abdillah Hanafi (1987), menerangkan bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu. Kepemimpinan ini biasanya bersifat polimerik yaitu berkenaan dengan urusan yang bersifat umum dalam suatu masyarakat, juga mempunyai hubungan sosial yang lebih luas daripada pengikutnya. Kepemimpinan ini biasanya menduduki suatu jabatan formal, tetapi pengaruhnya berlaku secara informal. Mereka mempunyai pengaruh yang tumbuh bukan karena di tunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal.<sup>5</sup> Pemimpin sebagai *agent of change*, dalam memelopori jalan untuk meninggalkan tradisi masa lampau juga terpengaruh oleh tekanan-tekanan sosial yang menyertai proses perubahan sosial yang sering menimbulkan perubahan pada lembaga sosial lainnya.<sup>6</sup>

Menurut pendapat Max Webber, dalam buku *Struktur Dan Proses*; suatu pengantar sosiologi pembangunan, karangan Soleman B. Taneko (1990), menjelaskan bahwa sebuah wewenang yang didefinisikan oleh

---

<sup>5</sup> Hanafi Abdilah (ed), *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Surabaya: Usaha Nasional, 1987, hal 110-113.

<sup>6</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*. Yogyakarta: UGM Press, 1991, hal 307

kebanyakan ahli sosiologi adalah sebagai kekuasaan yang sah, dan dibedakan dalam tiga bentuk yaitu : (1) wewenang atau otoritas tradisional yaitu pembangunan kekuasaan yang sah karena dijalankan sesuai dengan tradisi, merupakan suatu bentuk wewenang patrimonialisme, merupakan perluasan rumah tangga pribadi atau raja. (2) Wewenang legal rasional yaitu penggunaan kekuasaan yang sah karena dijalankan sesuai dengan hukum atau peraturan tertulis. (3) Wewenang kharismatik merupakan anti thesis dari legal rasional dan tradisional berdasar kharismatik pribadi, daya tarik dan keulungan istimewa dari pribadi pemegang kekuasaan dan otorita.<sup>7</sup>

Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi dalam bukunya yang berjudul *Dilema Ekonomi Desa* (1987), mengemukakan bahwa modernisasi yang membawa perluasan perekonomian uang dan pertumbuhan penduduk desa atas sumber daya tanah yang terbatas, akan menyertai perubahan dalam kelembagaan desa, mengenai hak milik lahan dan ikatan kontrak antara petani, buruh tani dan pelaku lainnya. Sebagai pusat perhatian ini berusaha membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa serta dampak-dampaknya. Perubahan dalam bidang produksi dan distribusi pada komunitas pedesaan melibatkan perubahan-perubahan pada pranata desa, yaitu tekanan pada penduduk dan perubahan teknologi mempengaruhi produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian. Perubahan dalam penyediaan sumber dan teknologi telah menimbulkan tekanan besar pada

---

<sup>7</sup> Soleman B. Taneko, *Struktur Dan Proses ; suatu pengantar sosiologi pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal 85-86.

pranata desa yang sudah terbentuk dalam keadaan yang relatif tetap. Lingkungan sosial budayapun terjadi pengukuhan dalam bentuk beberapa pranata. Faktor-faktor sosial budaya seperti itu terutama yang sangat kuat dalam komunitas desa, tempat interaksi sosial yang lebih luas terwujud.<sup>8</sup>

Popkin dalam bukunya yang berjudul, *Rational Peasant* (1989), mengemukakan tentang rasionalisme petani.<sup>9</sup> Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, ia mengatakan bahwa petani sebenarnya berfikir rasional, dalam arti mereka bebas dalam mengambil keputusan atau dalam mengadakan pemilihan-pemilihan. Bagi ekonomi politik, terjadinya pergeseran desa-desa tertutup (*coorporate villages*) masa prakapitalis kepada desa-desa terbuka (*open villages*) dan perubahan dari hubungan feodal yang berdifusi dari berikatan ganda elit agraris dengan petani berikatan tunggal dan kontraktual justru menimbulkan rasionalisme petani.

Diilhami oleh pandangan Rogers dalam bukunya Arbi Sanit (ed) *Strategi Pembangunan Yang berawal Dari Desa* (1983).<sup>10</sup> Ada beberapa macam perubahan yang dapat dirangkum dalam gambaran desa yang akan datang. Satu diantaranya ialah perubahan yang beranjak dari dalam dirinya sendiri. Perubahan yang lain, penyebabnya terutama yang datang dari luar,

---

<sup>8</sup> Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa; suatu pendekatan ekonomi terhadap perubahan kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987, hal 1-10.

<sup>9</sup> Popkin S.L, *Rational Peasant; the political economy of rural society in Vietnam*. Barkley: Universitas of California Press, 1979, hal 2.

<sup>10</sup> Arbi Sanit (ed), *Strategi Pembangunan Yang Berawal Dari Desa*. Jakarta: Usaha Nasional, 1983, hal 5.



baik karena rangsangan atau karena dorongan atau tarikan dari anggota masyarakat lainnya.

Dalam bukunya Mubyarto, *Politik Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*.<sup>11</sup> Petani-petani Indonesia setelah setelah masa kemerdekaan hingga saat ini menyadari, mereka bukan lagi kuli atau yang berarti pemilik tanah dengan kewajibanya. Tetapi adalah rakyat, mereka adalah warga suatu negara merdeka dan mereka seharusnya ikut serta menentukan baik buruknya pemerintahan.

Dalam bukunya Sajogjo dan William L. Collier, *Budidaya Padi di Jawa*. Dalam buku ini diuraikan mengenai pembudidayaan padi di Jawa dan Madura. Pada umumnya penanaman padi di Jawa dan Madura masih bersifat tradisional, masih menggunakan peralatan sederhana dan juga belum menggunakan pupuk buatan dan obat-obatan kimia secara menyeluruh. Maka pada saat-saat tertentu panen padi di Jawa sering kali mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan seluruh penduduk Jawa dan Madura. Namun demikian sistem penanaman padi pada masa kolonial sudah menggunakan sistem irigasi yang teratur.

Dalam mengolah sawahnya, para petani yang memiliki sawah yang luas menggunakan tenaga buruh yang ada di desanya. Para buruh ini mendapat upah dari majikanya sesuai dengan perjanjian yang diatur dengan peraturan tertulis dan ada yang meminjamkan atau menyewakan sawahnya

---

<sup>11</sup> Mubyarto, *Politik Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hal 32-38.

kepada orang lain untuk digarap. Pada masa kolonial penggunaan tenaga kerja pria dirasa tidak mencukupi maka digunakan tenaga kerja wanita.

Mengenai politik penjualan beras dan pengaturan harga beras dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sistem monopoli perdagangan untuk ekspor dan memenuhi kebutuhan pangan di Batavia. Harga beras yang rendah bukan disebabkan oleh banyaknya produksi tetapi ditujukan agar para pekerja pabrik dan perkebunan yang berpenghasilan rendah dapat membeli beras.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang tidak lepas dari pendekatan sosiologi, yaitu menyoroti tentang hubungan dengan ilmu sosial lainnya, seperti : ekonomi, budaya, keberadaan seseorang dan sebagainya. Metode historis merupakan proses pengumpulan, pengujian dan menganalisa rekaman suatu masa lampau tersebut menjadi suatu kisah sejarah yang dapat dipercaya.<sup>13</sup> Metode historis pada umumnya memperhatikan proses dan struktur yang terdapat dalam ruang dan waktu (temporal) tertentu. Masyarakat sebagai gejala mempunyai dimensi temporal, sistem sosialnya atas interaksi yang telah dipranatakan serta mempunyai kontinuitas atau berlangsung secara terus menerus sesuai dengan perkembangannya. Sebelum mengolah data, fakta dan dokumen perlu

---

<sup>12</sup> Sajogjo dan William L. Collier (ed), *Budidaya Padi Di Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1986.

<sup>13</sup> Louis Gottscalk, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1986,hal 32.

dianalisa.<sup>14</sup> Selain itu juga mengutamakan metode diskriptif analitis, sehingga cukuplah terpenuhinya bahan-bahan penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya dalam penulisan ini diambil langkah untuk menentukan tehnik dalam pengumpulan data, juga pengolahan dan analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, khususnya daerah pedesaan. Daerah ini diambil dengan berbagai alasan ; wilayahnya merupakan mayoritas lahan pertanian sawah basah (teririgasi), penduduknya sebagian besar mata pencaharian sebagai petani persawahan, wilayah ini dianggap sebagai barometer pertanian di daerah sekitarnya (Yogyakarta dan Surakarta) dan sebagai pemasok bahan pangan pokok atau beras yang mempunyai kuantitas dan kualitas yang baik. Selain itu penulis merasa tertarik dengan penelitian terhadap tema pertanian tersebut karena kedekatan geografis menjadi salah satu pendorongnya serta lebih mempermudah dalam penemuan, pencarian data-data penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983, hal 83.

<sup>15</sup> Sejarawan Kuntowijoyo menyarankan kepada mahasiswa sejarah dalam melakukan penulisan skripsi agar memperhatikan aspek kedekatan geografis subyek dengan tempat tinggalnya. Hal itu selain mempermudah penelitian, juga dimaksudkan agar sejarah lokal agar terdokumentasi lebih baik. Untuk lebih jelasnya baca Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Benteng Budaya, 1998.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mencari, mengumpulkan data melalui berbagai cara diantaranya :

### a. Studi Dokumen

Studi sejarah tidak lepas dari dokumen-dokumen untuk analisa dan sebagai pedoman dari pengungkapan dari masa lalu. Dalam studi ini penulis memanfaatkan data, dokumen yang ada di kantor Balai Penelitian Dan Pengembangan Benih Padi di Tegalondo Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Klaten, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Delanggu selain itu tidak menutup kemungkinan untuk mencari dan mengkaji data, dokumen lain, misalnya di kantor kecamatan maupun di kantor kepala desa wilayah tersebut.

### b. Wawancara

Adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh secara langsung atau tertulis. Disini penulis melakukan wawancara secara langsung dan berstruktur dengan beberapa informan, baik dalam bentuk nonformal ataupun formal yaitu pegawai dari instansi yang berhubungan dengan tema yang dikaji.

### c. Studi Pustaka

Sebelum mengungkapkan permasalahan, terlebih dulu penulis memperdalam teori dan konsep yang relevan dengan penulisan ini. Literatur literatur pendukung data dalam kajian ini sangatlah penting artinya guna untuk melengkapi data dalam penelitian, maka digunakan

buku-buku literatur yang diperoleh melalui perpustakaan yang ada di daerah-daerah maupun di universitas.

d. Teknik Analisa Data

Studi penulisan ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pengolahan data dengan membandingkan hasil-hasil informasi melalui wawancara dengan hasil obserfasi dokumen. Sedangkan analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu analisa berdasarkan pada hubungan kausal dari fenomena historis dalam situasi tertentu pula. Analisa disini digunakan untuk melihat dimensi fenomena sejarah yang terjadi secara prosesusual berdasar kronologi waktu, kemudian ditarik kesimpulan dan diinterpretasikan dari permasalahan yang ada.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menguraikan skripsi ini, untuk mendapatkan gambaran mengenai arah dan ruang lingkup skripsi, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II, berisi gambaran umum daerah penelitian yang terdidi dari letak dan keadaan topografi, struktur penduduk dalam masyarakat pedesaan, potensi lahan dan keadaan irigasi, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan usaha tani padi, pola umum kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan.

Bab III. membahas kepemimpinan pamong desa dalam pertanian, yang terdiri dari pemerintahan desa di Kabupaten Klaten, pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang pertanian, realisasi proyek *tani makmur* dan keberadaan pemerintahan desa, usaha-usaha dari pamong desa dalam peningkatan produksi pertanian padi.

Bab IV membahas keberadaan pamong desa dalam masyarakat pedesaan, yang terdiri dari; pemerintahan desa sebagai legitimasi kebijakan pemerintah pusat, ikatan-ikatan sosial masyarakat petani dengan pamong desa, tanggapan petani masyarakat pedesaan di daerah Kecamatan Delanggu.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan yaitu sebagai jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Letak Dan Keadaan Topografi**

Letak Kecamatan Delanggu, 14 kilometer sebelah timur laut dari ibukota Kabupaten Klaten, atau sekitar 18 kilometer sebelah barat daya kota Surakarta. Daerah ini merupakan daerah dataran rendah dengan bentangan luas tanah persawahan. Batas-batas wilayah Kecamatan Delanggu sebagai berikut : sebelah utara Kecamatan Wonosari, sebelah timur Kecamatan Juwiring, sebelah selatan Kecamatan Ceper, sebelah barat Kecamatan Polanharjo. Wilayah Kecamatan Delanggu yang berada diantara daerah-daerah pertanian ini, sangatlah menguntungkan karena daerah ini merupakan lahan-lahan yang juga baik dan berpotensi untuk pertanian padi.

Kecamatan Delanggu merupakan daerah dataran rendah dari bagian lembah gunung Merapi dan Merbabu dengan ketinggian 153 meter dari permukaan air laut. Jenis tanahnya termasuk jenis tanah regosol kelabu dengan struktur sifat batuan dari batu endapan kapur. Tanah regosol kelabu yaitu tanah campuran antara tanah liat dengan batuan kapur serta lapisan kelabu yang berasal dari abu gunung berapi saat meletus, sehingga banyak mengandung mineral serta sifat tanahnya menjadi *gembur*. Jenis tanah tersebut merupakan tanah yang sangat cocok dengan pelaksanaan pertanian.

Apabila dilihat dari keadaan iklim, wilayah tersebut memiliki iklim sedang dengan curah hujan bulanan; 20,2 mm pada bulan Juli dan 27,2 mm pada

bulan Januari. Menurut catatan statistik, daerah Kecamatan Delanggu termasuk daerah subur dengan curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 1975 di daerah ini terjadi hujan sebanyak 130 hari dengan ketebalan 2.776 mm setiap terjadi pada musim penghujan.<sup>1</sup> Penyinaran matahari rata-rata 69 % kecepatan cahaya 177,6 Km/jam di wilayah Kecamatan Delanggu dan wilayah kecamatan sekitarnya. Sedangkan temperatur udara rata-rata 28,9 derajat celsius, dengan kelembaban yang relatif tinggi yaitu 74 %. Keadaan cuaca dan iklim tersebut sangat memenuhi kebutuhan tanaman untuk tumbuh dengan baik sehingga menghasilkan penenan yang diinginkan.

Bentuk dan lapisan dari tanah dataran berlapis lapis, lapisan paling atas adalah lapisan tanah humus, lapisan selanjutnya secara urut adalah tanah liat, padas merah, batu padas, tanah liat keras, bladu (lumpur), pasir, kerikil, air, terakhir batu-batuan yang tersusun secara tidak menentu. Keadaan tanah yang naik turun tidak terlalu dalam secara tidak merata, disebabkan karena banyaknya sungai yang mengalir memisahkan tanah lahan pertanian baik besar maupun kecil. Dari adanya aliran sungai sering kali dijadikan batas wilayah dusun maupun desa, bahkan batas wilayah kecamatan.

Kecamatan Delanggu mempunyai luas daerah 18,78 Km<sup>2</sup>, dimana 13,59 Km<sup>2</sup> berupa tanah persawahan, 5,19 Km<sup>2</sup> berupa tanah kering untuk pemukiman penduduk dan lainnya. Kecamatan Delanggu terdiri dari 16 wilayah Desa tersebar mengelilingi ibukota Kecamatan Delanggu. Wilayah desa-desa tersebut antara

---

<sup>1</sup> Bappeda Klaten, *Statistik Kabupaten Klaten Tahun 1975-1976*. Klaten; K.S.S., 1976, hal 2-3.



lain: Dukuh, Jetis, Butuhan, Banaran, Bowan, Sribit, Mendak, Krecek, Karang, Sabrang, Tlobong, Gatak, Delanggu, Kepanjen, Segaran, dan Sidomulyo. Untuk mengetahui keadaan dan luas wilayah desa, untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini;

**Tabel II.1**  
**Luas Wilayah Menurut Tanah Sawah, Tanah Kering Tiap Desa**  
**Di Kecamatan Delanggu Tahun 1980**  
**(Dalam Km<sup>2</sup>)**

No	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Luas Wilayah
1	Dukuh	0,89	0,28	1,17
2	Jetis	0,75	0,38	1,13
3	Butuhan	0,79	0,30	1,09
4	Banaran	1,39	0,46	1,85
5	Bowan	0,75	0,33	1,08
6	Sribit	0,32	0,32	1,83
7	Mendak	0,77	0,21	0,98
8	Krecek	0,73	0,18	0,91
9	Karang	0,86	0,30	1,16
10	Sabrang	0,64	0,27	0,91
11	Tlobong	0,79	0,36	1,15
12	Gatak	0,73	0,33	1,06
13	Delanggu	0,74	0,63	1,37
14	Kepanjen	0,73	0,38	1,11
15	Segaran	0,60	0,30	0,90
16	Sidomulyo	0,92	0,16	1,08
Jumlah		13,59	5,19	18,78

Sumber : Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Klaten 1980.

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa luas lahan tanah sawah di Kecamatan Delanggu, dibandingkan dengan lahan tanah kering bukan sawah sangat mencolok, perbandingannya lebih dari dua kalinya. Hal tersebut menggambarkan bahwa wilayah Kecamatan Delanggu terdiri dari tanah lahan pertanian yang cukup luas, sehingga dapat memberikan gambaran bahwa masyarakatnya hidup berhubungan erat dengan bidang pertanian. Adapun

perbedaan jumlah luas wilayah dari desa-desa tidak berbeda jauh antara wilayah satu dengan yang lainnya. Bentuk dari tanah keringpun masih digolongkan lagi berdasarkan atas kegunaan, diantaranya adalah tanah perumahan yaitu tanah kering berupa *kebon* untuk dibangun rumah maupun bangunan lain, tanah kering untuk kegiatan, usaha, sosial dan umum misalnya untuk tempat peribadatan (masjid di tiap desa, mushola, langgar, 1 buah pura, 3 buah gereja), lapangan sepak bola(di Dukuh, Sribit, Segaran, Delanggu), untuk bangunan sekolahan (SD di tiap desa, 3 SMP negeri, 2 SMP swasta, 1 SMA negeri, dan lain-lan), untuk bangunan pabrik Karung Goni

## **B. Struktur Masyarakat Kecamatan Delanggu**

Berdasarkan catatan statistik, kehidupan masyarakat di Kecamatan Delanggu sebagian besar memiliki hubungan erat dengan kegiatan pertanian, hal tersebut disebabkan kondisi tanah wilayah dengan lapisan tanahnya yang subur serta tersedianya prasarana dan sarana di bidang pertanian. Tanpa meninggalkan dari profesi masyarakat diluar kegiatan dan usaha sebagai petani, dengan kegiatan yang dilakukannya seperti : pedagang, pegawai, karyawan atau buruh (buruh tani dan buruh pabrik Karung Goni) dan sebagainya. Untuk mengetahui prosentase penduduk dilihat dari mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk di Kecamatan Delanggu, untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini :

**Tabel II.2**  
**Prosentase Mata Pencapaian Penduduk**  
**Kecamatan Delanggu Tahun 1971**

1	Petani	60 %
2	Pengusaha, Pedagang, dan Pengrajin	15 %
3	Buruh dan Pegawai Negeri	20 %
4	Lain-lain	5 %
Jumlah total		100 %

Sumber : monografi Kecamatan Delanggu tahun 1971.

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa prosentase mata pencapaian penduduk di Kecamatan Delanggu yang bekerja atau hidup berhubungan dengan pertanian sebagai petani ataupun buruh tani, buruh tander dan yang berkaitan seperti penebas, penjual pupuk dan sebagainya merupakan jumlah penduduk yang paling besar, melebihi dari setengah jumlah penduduk seluruhnya di Kecamatan Delanggu. Menurut data statistik kecamatan secara perinci mata pencapaian adalah 2.590 petani sendiri, 5.485 buruh tani, 132 pengusaha, 1.424 buruh industri. Untuk lebih mengetahui jumlah penduduk seluruh di Kecamatan Delanggu berdasarkan jenis kelamin dan tingkat umur sederhana yaitu dewasa anak dalam umur aktif dan kerja , lihat tabel di bawah ini:

**Tabel II.3**  
**Penduduk Warga Negara Indonesia Daerah Kecamatan Delanggu**  
**Menurut Dewasa/Anak, Jenis Kelamin Pada Akhir Tahun 1974.**

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Dewasa	8.416	10.138	18.554
Anak	10.600	10.654	21.254
Jumlah			39.808

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Klaten 1974

Jadi jumlah penduduk yang hidup atau dalam memperoleh penghasilan dengan bergantung dari bidang pertanian adalah 60 % dari total jumlah penduduk di Kecamatan Delanggu adalah 23.885 jiwa. Penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja juga mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. Dan untuk lebih mengetahui tentang perkembangan jumlah penduduk perdesa pertahun di Kecamatan Delanggu lihat tabel di bawah ini ;

**Tabel II.4**  
**Jumlah Penduduk Daerah Kecamatan Delanggu**  
**Diperinci Perdesa, Mulai Tahun 1977-1983**

No	Nama Desa	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1	Delanggu	5.171	5.712	5.665	5.097	5.842	5.842	6.019
2	Gatak	3.281	3.436	3.493	3.585	5.585	3.704	3.719
3	Sabrang	3.095	2.983	3.015	3.073	3.046	3.046	3.107
4	Tlobong	2.995	2.956	2.981	3.032	3.067	3.082	3.123
5	Karang	1.919	1.866	1.886	1.903	3.067	3.082	3.123
6	Banaran	2.550	2.751	2.769	2.807	2.851	2.845	2.363
7	Butuhan	1.895	1.611	1.773	1.756	1.769	1.794	1.812
8	Jetis	1.719	1.672	1.638	1.677	1.699	1.727	1.751
9	Dukuh	2.183	2.755	1.706	1.889	1.923	1.948	1.967
10	Bowan	2.236	1.867	1.875	1.929	1.953	1.953	2.000
11	Sribit	2.874	2.711	2.980	2.863	2.893	2.914	2.918
12	Mendak	2.064	2.023	2.043	2.063	2.025	1.949	2.022
13	Krecek	1.526	1.436	1.453	1.455	1.353	1.361	1.400
14	Kepanjen	2.793	2.556	2.589	2.628	2.578	2.665	2.707
15	Segaran	2.511	2.327	2.403	2.464	2.525	2.595	2.649
16	Sidomulyo	1.862	1.816	1.838	1.878	1.903	1.888	1.918
		41.214	39.478	40.107	40.899	40.881	41.245	41.442

Sumber : Hasil Registrasi Kantor Statistik Kabupaten Klaten, 1983.

Melihat tabel di atas, penulis dapat menggambarkan penduduk di Kecamatan Delanggu dari tahun ketahun tumbuh dan berkembang secara normal atau tidak mengalami penurunan dan ledakan jumlah penduduk yang besar. Perbandingan jumlah penduduk yang mencolok hanya terjadi pada wilayah Desa Delanggu, karena wilayah Desa Delanggu merupakan ibukota Kecamatan

Delanggu, pusat sentra perekonomian seperti pasar, terminal, kios-kios toko dan aktifitas lainnya, sehingga penduduknya cukup besar dibanding desa lain. Dari keadaan penduduknya, dimana sebagian besar berhubungan erat dengan pertanian semakin menguatkan keberadaan masyarakatnya hidup dengan berpola agraris desa. Kehidupan berpola agraris desa mempunyai pengaruh besar terhadap aktifitas sosial, ekonomi, budaya, bahkan dalam hal berpolitik.

Meskipun struktur penduduk di Kecamatan Delanggu tersebut secara administratif terpisah dengan perangkat pemerintahan masing-masing, seperti kepala desa, pamong desa, pejabat-pejabat pemerintahan dengan masyarakat, akan tetapi masih merasakan adanya suatu ikatan kebersamaan yang kuat. Ikatan kesatuan kehidupan penduduk masih dirasakan pula antar desa atau dusun dengan lokasi dusun lain yang tidak beraturan yaitu masih kuat dengan melakukan interaksi, oleh karena mereka saling berinteraksi dalam perekonomian dan terutama di bidang pertanian. Demikian juga dengan masyarakat diluar aktifitasnya sebagai petani antara satu desa terhadap desa yang lainnya. Dalam hal politik masyarakat petani juga sangat dipengaruhi dan mempengaruhi dalam hal kebijakan desa, seperti dalam pencalonan dan pemilihan kepala desa dan perangkat lainnya. Dimana calon kepala desa atau pamong desa yang memiliki pengaruh besar terutama dalam pertanian, memiliki nilai lebih dan prosentase besar terwujud pencalonannya dibandingkan dengan calon lain yang kurang memiliki pengaruh besar di bidang pertanian.

### **C. Potensi Lahan dan Irigasi**

Kecamatan Delanggu dimana wilayahnya sebagian besar merupakan lahan pertanian, yaitu pertanian sawah basah, dengan tanaman padi sebagai jenis tanaman pertanian utama dan terbesar diperdagangkan oleh masyarakatnya. Hal ini didukung wilayah Kecamatan Delanggu merupakan daerah bentangan dari dataran rendah dengan jenis tanah regosol kelabu.<sup>2</sup> Serta wilayah Kecamatan Delanggu didukung letak yang sangat strategis dengan kedekatan daripada daerah perkotaan yang cukup besar seperti Surakarta dan Yogyakarta, sehingga baik untuk digunakan sebagai lahan pertanian untuk memenuhi dari kebutuhan pangan daerah perkotaan tersebut. Daerah Kecamatan Delanggu merupakan bagian dari dataran rendah yang cukup luas, daripada dua gunung yang cukup besar dan salah satunya masih aktif yaitu Gunung Merapi dan Merbabu, sehingga tanah dan lahan pertanian tersebut memiliki kandungan humus yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan suatu tanaman.

Keadaan irigasi yang merupakan sarana penting dalam pertanian padi di daerah Kecamatan Delanggu. Dengan tersedianya sumber air dan saluran irigasi dengan kualitas air terbaik, dengan kandungan mineralnya yang sangat besar sesuai yang dibutuhkan tanaman. Serta kedekatan jarak dengan sumber-sumber mata air alami, seperti umbul cokro, umbul ponggok, umbul janti, umbul ngendu, umbul nilo dan sebagainya. Kelancaran mengalirnya air menuju ke lahan

---

<sup>2</sup> Tanah regosol kelabu yaitu tanah netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, coklat dan kelabu, produktifitasnya tinggi dan biasanya digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Tanah ini berasal dari bahan induk dari abu dan pasir vulkanis intermedian. lihat laporan dinas pertanian Kabupaten Klaten tiap tahun.

pertanian sangat lancar karena didukung letak daerah yang sedikit menurun dari sumber mata air, serta didukung oleh adanya sungai-sungai besar sebagai saluran irigasi besar, serta telah dibangun saluran-saluran irigasi kecil baik yang permanen maupun yang belum permanen. Tersedianya irigasi yang cukup besar dan teratur, sehingga musim kemarau pun petani masih dapat mengolah lahan pertaniannya dengan baik, dalam setahun dapat mengolah lahan persawahan secara terus menerus, tidak mengandalkan adanya air pada musim penghujan. Untuk lebih jelasnya mengenai pengairan di daerah Kabupaten Klaten, maka lihat tabel di bawah ini.

**Tabel II.5**  
**Daftar Buku Tanah Oncoran, Tadahan dan Tegalan**  
**Seksi Pengairan Kabupaten Klaten tahun 1970 Tiap Ranting**

Ranting	Luas baku tanah (Ha)					
	Oncoran				Tadah hujan	Tegalan
	Teknis	½ teknis	Liar	Jumlah		
Klaten	2.793,5	2.214,7	390,2	5.398,4	145,46	48,22
Prambanan	1.580,2	2.780,5	1.688,3	6.049	279,97	324,29
Ceper	2.260,3	2.360,5	61,3	4.682,2	98,70	250,34
Wonosari	3.558,1	502,1	115,2	4.175,4	102,97	1.278,77
Delanggu	4.333,4	728,8	533,4	5.595,6	206,5	-
Cawas	2.227,3	1.620,1	653,5	4.500,9	866	744,21
Karanganom	1.344,1	3,223,8	389,8	4.957,7	528.14	1.567,18
Jumlah	18.096,9	13.430,6	3.831,7	35.359,2	2.217,74	4.213,01

Sumber : Dinas Pengairan Kabupaten Klaten 1970.

Dengan melihat tabel di atas, wilayah Kecamatan Delanggu memiliki sumber irigasi dan saluran irigasi yang paling banyak dibanding daerah lain di Kabupaten Klaten. Sedangkan sumber air di tiap-tiap ranting pengairan adalah Prambanan 31 buah, Klaten 17 buah, Karanganyar 23 buah, Cepur 13 buah,

Wonosari 4 buah, Delanggu 27 buah. Total sumber air yang terdaftar berjumlah 118 buah. Dengan didukungnya sumber mata air tersebut, maka pertanian di daerah Kecamatan Delanggu dapat berlangsung secara lancar dan baik, sehingga sangat cocok sebagai lahan percontohan dalam bidang pertanian yaitu penggunaan bibit jenis baru. Karena sebagai lahan percontohan, maka diambil daerah-daerah tertentu yang sangat baik, sehingga tidak mengalami kesulitan.

#### **D. Penggunaan Teknologi dalam Pelaksanaan Usaha Tani Padi**

Pelaksanaan pembangunan desa tergantung pada usaha pemerintah dalam mendinamiskan masyarakatnya, sedangkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam melancarkan usaha pembangunan tersebut sangatlah terbatas. Salah satu program pemerintah tercantum dalam Repelita pertama dan kedua adalah menaikkan produksi pertanian terutama bahan pangan yaitu beras.

Penggunaan teknologi pertanian mempunyai peranan sangat penting dalam usaha meningkatkan produksi pertanian. Menurut Birowo, teknologi pertanian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu teknologi hayati kimiawi dan teknologi mekanik.<sup>3</sup>

Teknologi hayati kimiawi digunakan dalam bentuk pemakaian bibit unggul, pupuk buatan, obat-obatan pembasmi hama atau pestisida. Sedangkan teknologi mekanik digunakan dalam bentuk pengolahan tanah, pengaturan irigasi

---

<sup>3</sup> A.T Birowo, *Teknologi Pangan Untuk Pembangunan Desa*. dalam Prisma No 6/VI/1979, Jakarta: LP3ES, hal. 12-25.



dan pengolahan hasil pertanian lebih banyak menggunakan tenaga mesin daripada tenaga manusia

Sebagian besar petani di Kecamatan Delanggu, dalam mengolah tanah lahan pertanian masih menggunakan cara tradisional. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mereka berada dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak mampu dan tingkat pendidikan rendah, sehingga dapat menghambat proses masuknya teknologi baru di bidang pertanian. Tetapi hal tersebut bukan merupakan penghalang pertumbuhan dan perkembangan pertanian yang direncanakan. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah, tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi di tingkat pedesaan sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan sistem pertanian yang lebih modern. Di bawah ini akan penulis jelaskan mengenai penggunaan teknologi dalam usaha tani padi di daerah penelitian dengan menggunakan kedua jenis teknologi pertanian tersebut.

#### 1. Teknologi Hayati Kimiawi

Pada dasarnya penggunaan teknologi hayati kimiawi di bidang pertanian bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. Jadi penggunaan teknologi kimiawi sangat tepat digunakan dan diterapkan di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam terbatas seperti di Kecamatan Delanggu.

Sebelum mengenal jenis-jenis padi unggul yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI) di Los Banos Filipina dan Lembaga Pusat penelitian Pertanian di Bogor, para petani di Delanggu menggunakan jenis padi tradisional seperti jenis padi Si Gadis, Shinta,

Bengawan, Rajalele, Genderuwo, Slogo, cempo dan sebagainya. Setelah pemerintah menerapkan program Bimas dan Inmas Baru yang dilakukan secara nasional, masyarakat petani diharapkan mulai menanam jenis padi baru tersebut adalah PB 5 (IR 5), PB 8 (IR 8) dan C 4 (Si- empat) yang berasal dari hasil penelitian IRRI di Filipina serta jenis Pelita Satu, dan Pelita Dua yang merupakan hasil temuan dari Lembaga Pusat Penelitian Pertanian di Bogor. Jika dibandingkan dengan jenis padi tradisional atau lokal, jenis padi baru tersebut memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Pertama, hasil produksinya lebih banyak. Kedua, umurnya lebih pendek. Ketiga, daya serap pupuk lebih banyak. Keempat, batangnya lebih kuat sehingga tidak mudah roboh. Kelima, tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Namun demikian, jika ditinjau dari segi aroma dan rasanya, jenis padi tradisional memiliki aroma dan rasa yang lebih unggul yaitu lebih wangi dan rasanya enak.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk dari kegiatan Bimas dan Inmas di daerah Kabupaten Klaten adalah dilaksanakannya Proyek Tani Makmur. Proyek ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman Barat dalam bidang pertanian yaitu penggunaan bibit padi PB 5 dan PB 8 yang di tanam pada areal tanah persawahan seluas 15.000 hektar. Dengan adanya *Proyek Tani Makmur* produksi padi mengalami kenaikan yang cukup besar. Jika dirata-rata produksi padi tradisional pada tahun 1967 hasilnya hanya 43 kuintal per hektar, maka pada tahun 1968 dengan jenis padi baru rata-rata produksinya mencapai

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak *Harso Suwito*, tanggal 4 mei 2002, lihat juga Somartono, *Bercocok Tanam Padi*. Jakarta: CV.Yasaguna, 1972, hal. 26-28.

85 kuintal per hektar.<sup>5</sup> Jadi terjadi peningkatan produksi padi dua kali lipat bahkan lebih dari hasil penanaman bibit padi jenis baru tersebut.

Disamping faktor genetis atau jenis padi yang ditanam ada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi produksi padi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor lingkungan yang meliputi temperatur, sistem pengairan, kelembaban udara, iklim, perkembangan hama dan penyakit serta tingkat kesuburan tanah.<sup>6</sup> Tingkat kesuburan tanah ini dapat berkurang karena diserap oleh tanaman dan juga karena pengikisan. Untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut perlu dilakukan perawatan tanah dan pemupukan secara teratur.

Ada tiga jenis pupuk yang dikenal oleh petani di Kecamatan Delanggu yaitu pupuk kandang atau kompos, pupuk buatan dan pupuk hijau. Dari ketiga jenis pupuk tersebut yang paling banyak digunakan petani adalah pupuk kandang dan pupuk buatan. Jenis pupuk buatan yang sudah dapat diproduksi bangsa kita sendiri sejak tahun 1974 adalah pupuk urea, TSP, ZA dan KCl.<sup>7</sup> Sebenarnya semua jenis pupuk tersebut di atas sangat penting dan sangat diperlukan oleh tanaman padi. Tetapi karena pupuk tersebut harganya masih dianggap terlalu mahal, maka sebagian besar petani hanya menggunakan pupuk

---

<sup>5</sup> Laporan *Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten*. tanggal 3 Mei 1969, lihat lampiran.

<sup>6</sup> Mulyani Sutejo, *Pupuk Dan Cara Pemupukan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987, hal 62-68.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bp Pawiro Sayono, petani besar (kaya) dan penebas, tanggal 5 Mei 2002

urea saja. Untuk mengetahui penggunaan pupuk yang secara terus menerus mengalami peningkatan maka perhatikan tabel berikut ini :

**Tabel II.6**  
**PRODUKSI PUPUK DALAM NEGERI 1974-1979**

Periode	ZA (ribuan ton)	Urea (ribuan ton)	TSP (ribuan ton)
1974/1975	110	188,9	-
1975/1976	110	400,0	-
1976/1977	110	820,0	82
1977/1978	110	1.272,0	167
1978/1979	110	2.084,0	254

Sumber : Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Klaten 1979

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa produksi pupuk urea dan TSP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Antara tahun 1974-1975 produksi pupuk nasional hanya mencapai 188,9 ribu ton. Setelah tahun 1978-1979 produksi pupuk dalam negeri meningkat menjadi 2.084 ribu ton. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program Bimas dan Inmas di seluruh Indonesia. Jika kita menghubungkan antara jumlah pupuk yang diperlukan tanaman padi setiap hektarnya sebesar 190 kilogram hingga 350 kilogram pada lahan pertanian di Kabupaten Klaten yang luasnya sekitar 35.454 hektar, maka dapat diperkirakan kebutuhan pupuk di Kabupaten Klaten berkisar antara 6,74 ribu ton hingga 12,41 ribu ton dalam satu kali masa tanam. Umumnya petani di seluruh Kabupaten Klaten dapat menanam padi minimal dua kali dalam setahun.<sup>8</sup>

Bentuk lain penggunaan teknologi hayati kimiawi dalam bidang pertanian adalah pemakaian pestisida untuk membasmi hama tanaman.

---

<sup>8</sup> Laporan Tahunan, Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 1980.

Menurut keterangan bapak Harso Suwito, mengatakan ada beberapa jenis hama dan penyakit yang merusak tanaman padi, seperti hama putih, ulat tanah atau ulat grayak, ulat daun, wereng, belalang, sundep atau penggerek batang dan tikus sawah. Sebelum mengenal obat-obatan dan peralatan modern, petani dalam memberantas hama dan penyakit menggunakan cara-cara tradisional. Untuk memberantas ulat daun, wereng dan hama lainnya yang melekat pada daun dan batang padi, mula-mula sawah digenangi air kemudian diberi lapisan minyak tanah. Selanjutnya hama yang menempel pada batang dan daun disapu agar berjatuh dalam air yang sudah bercampur dengan minyak tanah sehingga hama tersebut mati. Cara ini mulai ditinggalkan setelah mereka mengenal obat-obatan dan peralatan modern. Untuk memberantas hama dan penyakit tanaman padi mereka mulai menggunakan obat-obatan kimia yang dijual pada toko-toko pertanian atau KUD, kemudian dengan menggunakan alat semprot atau sprayer yang didapat dengan kredit dari pemerintah.<sup>9</sup> Adapun jenis obat-obatan yang beredar waktu itu antara lain : *endrin, diazenon, aldrin, zevin 855, melation, filidol, azodrin dan gardona*. Untuk memberantas tikus sawah biasanya dilakukan dengan sistem gropyokan atau menangkap tikus secara bersama-sama. Selain itu juga dengan racun tikus yang dicampur pada ubi, kemudian disebar pada sawah yang diserang hama tikus, atau dengan cara pengasapan yang dicampur dengan belerang atau biasanya disebut dengan cara *digembus*, yaitu memasukkan asap belerang kedalam lubang tikus dengan alat

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Harso Suwito, tanggal 4 Mei 2002.

bantu kempusan. Jadi dengan pemberantasan hama dan penyakit tersebut di atas, produktifitas padi dapat ditingkatkan.<sup>10</sup>

## 2. Teknologi Mekanik Pertanian

Mekanisasi pertanian adalah penggunaan alat-alat mekanis di bidang pertanian baik untuk pengolahan tanah, irigasi, maupun untuk mengolah hasil pertanian. Tujuan mekanisasi pertanian adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi padi dengan cara mengefektifkan tenaga kerja manusia.<sup>11</sup>

Dalam mengolah lahan tanah pertanian di daerah Kecamatan Delanggu masih dilakukan dengan dua cara yaitu cara tradisional dan modern. Cara tradisional lebih banyak menggunakan tenaga manusia dan hewan seperti kerbau dan sapi untuk membajak (*nghuku dan menggaru*) tanah. Sementara itu cara yang modern dengan menggunakan tenaga mesin seperti traktor, spayer mesin. Jenis traktor yang dianggap paling tepat untuk digunakan adalah traktor tangan. Hal ini disebabkan karena tanah persil atau petakan-petakan sawah di wilayah Kecamatan Delanggu berukuran kecil, sehingga jika digunakan traktor besar akan mengalami kesulitan. Menurut Haryono, dengan menggunakan traktor tangan ini mempunyai beberapa keuntungan. Pertama keuntungan teknis, yaitu petani lebih mudah mengatur kedalaman tanah. Kedua keuntungan waktu, yaitu untuk mengolah tanah seluas satu hektar jika dikerjakan dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, tanggal 5 Mei 2002.

<sup>11</sup> Haryono, *Mekanisasi Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980, hal. 2.

tenaga manusia dengan cara dicangkuli akan selesai selama 70 hari, jika menggunakan bajak yang ditarik oleh dua kerbau dan dikendalikan seorang petani akan selesai selama 23 hari. Sebaliknya jika menggunakan traktor tangan hanya diperlukan dua orang tenaga manusia selama dua hari. Ketiga keuntungan ekonomis, yaitu besarnya biaya pengolahan tanah seluas satu hektar dengan dicangkuli manusia sebesar 35.000,- rupiah, jika menggunakan bajak tradisional biayanya sebesar 23.000,- rupiah. Jika menggunakan traktor tangan biayanya hanya sebesar Rp. 11.000,-saja, namun demikian di beberapa daerah menunjukkan bahwa para pemilik traktor tangan memungut biaya yang hampir sama dengan biaya pengolahan tanah secara tradisional yaitu sebesar Rp. 20.000,-, hal ini masih rendah jika dibandingkan dengan tenaga manusia.<sup>12</sup>

#### **E. Pola Umum Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan**

Kepemimpinan dalam masyarakat desa sangatlah sederhana, karena masih bersifat tradisional, yaitu kepemimpinan di desa yang berasal dari berbagai kelompok tersebut mempunyai kategori tersendiri, hanya beberapa kelompok mempunyai pengaruh sosial yang luas di kalangan masyarakat. Kelompok tersebut diantaranya adalah pejabat pemerintah desa atau pamong desa, *orang tua* atau yang dituakan sebagai pemuka desa, orang terpandang karena kepandaian, harta dan sebagainya. Pengaruh kepemimpinan sejalan dengan norma-norma sosial yang berlaku secara umum dan menyeluruh serta berpengaruh secara terus menerus. Naik turunnya pengaruh pemimpin desa sangat ditentukan oleh kondisi

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Soepandi, tanggal 14 Desember 2001.

serta situasi setempat, dalam hal ini perubahan perekonomian dan norma-norma sosial turut menentukan. Dengan demikian proses pencapaian kedudukan kepemimpinan di desa sangat dihubungkan dengan perkembangan desa

Perkembangan desa terjadi akibat adanya pengaruh kepemimpinan formal dan informal desa. Yang dimaksud kepemimpinan formal adalah pemimpin resmi dengan adanya peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat desa yang berdasarkan atas hukum dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Kepemimpinan formal terwujud karena kedudukan, jabatan resmi dari kedudukan pemerintah, yaitu kepala desa dengan pembantu-pembantunya yang disebut pamong desa. Sedangkan kepemimpinan informal adalah pemimpin yang muncul sebagai akibat daripada proses yang terjadi di dalam masyarakat, yang berarti timbul jenis-jenis informal leader karena adanya legitimasi daripada masyarakat terhadap kepemimpinannya.<sup>13</sup> Kepemimpinan informal di pedesaan yaitu kepemimpinan yang masih bersifat sederhana dan tradisional, juga mempunyai pengaruh yang besar di kalangan masyarakat tanpa ditentukan dengan kedudukan jabatan formal atau resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ia dapat menggerakkan ataupun mempengaruhi massa sesuai dengan kehendaknya. Pemimpin informal desa antara lain; elite-elite desa yang terdiri tokoh yang dianut masyarakat desa karena memiliki sifat-sifat dan kelebihan menonjol jarang dipunyai oleh masyarakat desa pada umumnya, misalnya tokoh-tokoh agama dan para *kyai*, *guru* atau *orang terpelajar*, *orang kaya* dan *tokoh* dalam bidang politik

---

<sup>13</sup> Sardjana Totosoehardjo, *Informal Leader Dalam Peningkatan Produksi Pertanian*. dalam Prisma, No X September tahun 1979. hal 17-20.



seperti ketua parpol. Elit desa merupakan kelompok kecil atau perorangan dalam masyarakat yang memiliki kelebihan daripada yang lain, dimana pola tingkah lakunya itu sendiri kadang-kadang tanpa disadari telah memetakan pola tingkahlaku bagi seluruh masyarakat desa.

Usaha-usaha pembangunan desa mencakup berbagai bidang kegiatan kehidupan masyarakat tidak terlepas dari perkembangan daerah dan masyarakat dimana kepemimpinan berlangsung. Pembangunan desa tergantung pada dinamika kehidupan masyarakat yang kemudian mendukungnya. Buddy Prasodjo dalam skripsinya dan sudah dibukukan berjudul “Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan” tahun 1982 menyatakan :

“.....Salah satu kenyataan yang tidak dapat diingkari ialah bagaimanapun juga pola pembangunan suatu desa masih tergantung kepada peran pemerintahnya, sehingga keberhasilan pembangunan suatu desa berhubungan erat dengan struktur pemerintah desa tersebut.....”.

Seberapa jauh pengaruh kekuasaan terhadap pembangunan ditentukan kategori kekuasaan daripada kepemimpinnya. Disinilah peranan elit desa sebagai pimpinan legal rasional yang memiliki dasar-dasar kewenangan formal sebagai kepala desa pada masyarakat desa, yang paling dinilai dalam kepemimpinan seseorang adalah hubungan bersifat pribadi antara pengikut dan pemimpin seperti terdapat pada informal leader. Sedangkan pemimpin formal, hubungannya pribadi dengan masyarakat desa dengan pemimpin bersifat agak kaku, terbatas karena adanya perbedaan aktifitas dan serasa dipaksakan oleh adanya peraturan. Hal tersebut timbul karena proses didalam masyarakat itu sendiri yaitu adanya jaringan komunikasi di desa pada umumnya lebih terpusatkan ke person dalam lapisan masyarakat.

### **BAB III**

#### **KEPEMIMPINAN PAMONG DESA DALAM PERTANIAN**

##### **A. Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten.**

Indonesia merupakan negeri yang tersusun dari desa-desa, sehingga kekuatan negara tergantung pada pedesaan dan potensinya. Negara Indonesia undang-undang banyak bersandar pada undang-undang dasar Belanda dari awal abad ke-20, melanjutkan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan desa itu dengan menyatakan bahwa “ .....desa berkewajiban melakukan tugas-tugas untuk semua kantor pemerintah di tingkat lebih tinggi.....”<sup>1</sup> Walaupun dalam peraturan dan undang-undang tentang pemerintahan desa, desa memiliki kewenangan otonomi, tetapi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, sebagian besar kebijakan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan di atasnya.

Di Jawa Tengah, Gubernur telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No G.70/1 September tahun 1968 mengatur struktur pemerintah desa. Struktur pemerintahan desa yang lama menekankan ciri keotonomian bahkan sampai dengan unit terkecil dalam desa. Kepala Desa atau Lurah Desa dan sekretaris desa atau *carik*, sedang di bawahnya ada sejumlah *kamituwo*, yang membawahi pejabat desa di dukuh-dukuh, membawahi pejabat pedukuhan seperti *bekel* atau *lurah dukuh*, *bayun*, *modin* dan *ulu-ulu*. Sedang struktur baru menurut UU No. 5 tahun 1979 bertujuan agar pemerintah desa menjadi lebih fungsional, struktur lebih diarahkan kepada petugas-petugas dengan tugas tertentu, antara lain

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 36 Undang-Undang Desa yang diperbarui 1965.

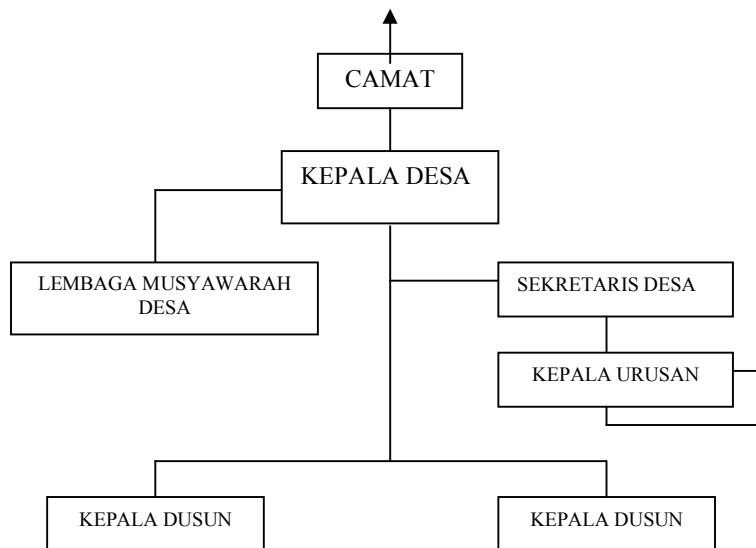
dengan memasukkan tugas kepamongan seperti Pamong Tani Desa (PTD), Pamong Ekonomi Desa (PED), serta hanya menunjuk seorang *modin*, *carik* dan *ulu-ulu* dalam suatu wilayah desa.

Di beberapa daerah, surat keputusan gubernur itu ternyata belum dapat diterapkan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Dari penelitian-penelitian terhadap desa yang telah dilakukan ternyata struktur lama masih hidup dengan beberapa unsur dari struktur baru dimasukkan kedalamnya. Keberadaan struktur tersebut dalam masyarakat sering mengalami tumpang tindih dalam kekuasaan dan kewenangan dalam mengatasi dan mengurus suatu perihal yang terjadi dalam masyarakat.

Wilayah Kabupaten Klaten terdapat 26 kecamatan, terdiri dari 296 desa dan 5 kalurahan. Keberadaan wilayahnya merupakan satu kesatuan dari pemerintahan daerah yang terbentuk secara administratif resmi. Dimana seluruh wilayah kecamatan telah ada petugas pertanian yaitu *mantri tani*, aparatur dinas dengan fasilitas kerja sendiri. Pejabat pemerintahan desa dengan pamong desa yaitu kepala desa, sekretaris desa (*carik*), kepala-kepala urusan (*kemaknuran*, *agama*, *kesejahteraan* dan *pemerintahan*), kepala dusun, Pamong Ekonomi Desa (PED), Pamong Tani Desa (PTD).

Dalam prakteknya penyelenggaraan pemerintahan desa banyak berorientasi kepada kebijakan dari tingkat pemerintahan di atasnya seperti kecamatan, kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat. Untuk lebih mengetahui tentang struktur pemerintahan desa, lihat bagan berikut ini :

**Gambar III. 1**  
**Susunan Organisasi Pemerintahan Desa**  
**Dan Perangkat Desa Menurut Ketentuan UU No. 5 Tahun 1979**

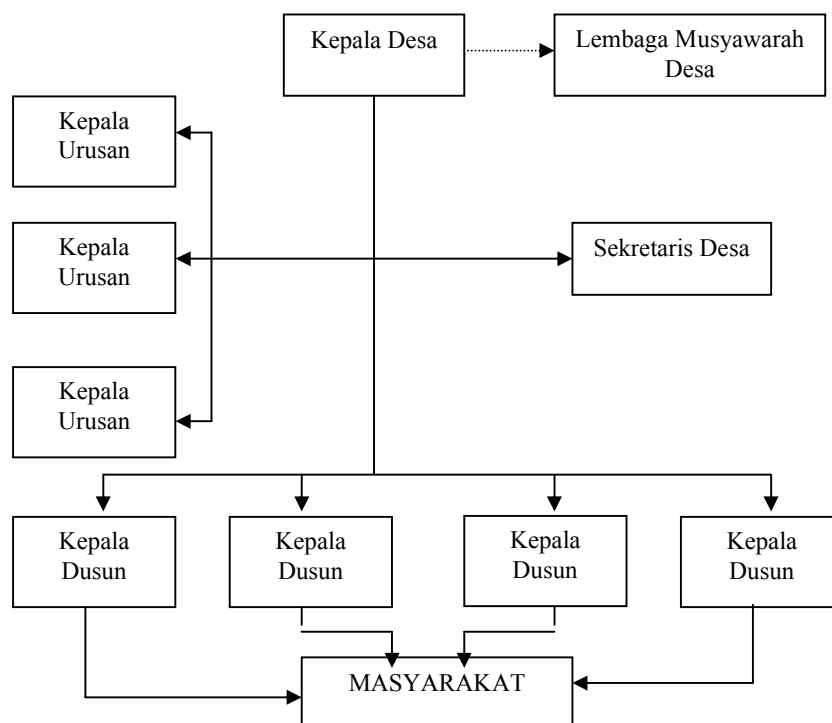


Sumber : Undang-Undang Tentang Pemerintahan Desa dan Undang Undang Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah. UU RI No.5 tahun 1979.

Dengan melihat gambar bagan di atas, dapat digambarkan bagaimana susunan organisasi yang terdapat di desa dalam melakukan hubungan dengan organisasi lainya yaitu dengan melihat dan melakukan daripada pertanggung jawaban serta pemberian dan penerimaan wewenang dari organisasi pemerintahan. Dimana kepala desa sebagai tokoh inti struktur pemerintahan desa, merupakan koordinator dari semua kegiatan, baik dengan lembaga diluar struktur desa diantaranya Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban, dilakukan secara vertikal dari kekuasaan pemerintah. Artinya kepala bertanggung jawab pada camat, sedangkan camat bertanggung jawab pada bupati dan selanjutnya.

Disamping itu terdapat hubungan yang berdasarkan bentuk dan keberadaan menurut UU No. 5 tahun 1979, struktur tata pemerintahan menunjukkan kedudukan dari setiap pamong desa, organisasi pemerintahan tersebut. Struktur tata pemerintahan ini memperjelas apa yang menjadi hak, wewenang, kewajiban serta tugas dari pamong desa. Bagan dari Struktur Tata Pemerintahan Desa menurut UU No. 5 tahun 1979 digambarkan sebagai berikut :

**Gambar III. 2**  
**Bagan Struktur Tata Pemerintahan Desa**  
**Menurut UU No. 5 tahun 1979**



Sumber : Thesis Kodiran “*Masyarakat Pedesaan dan Pembangunan*”, 1988.

Keterangan :

1. Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh warga desa, serta diangkat oleh Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih. Membawahi dari semua perangkat-perangkat desa, mengadakan

hubungan badan yang ada di desa yaitu Lembaga Musyawarah Desa yang memiliki hak mengontrol kerja dari pelaksanaan pemerintahan desa. LMD mempunyai kewenangan mengontrol dan mengawasi jalan pemerinthan desa, dimana hal itu mewakili dari rakyat yang memiliki kekuasaan yang paling besar.

2. Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Kepala daerah tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. Memiliki tugas dalam bidang administrasi, terutama surat-surat penting yang masuk dan keluar berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa. Mewakili kepala desa bila berhalangan hadir dalam suatu acara resmi ataupun tidak resmi desa, misalnya memberi sambutan, among tamu dan sebagainya.
3. Kepala Urusan dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota/Tingkat II atas usul Kepala Desa. Mereka melakukan kerja sesuai fungsi dan tugas dengan jabatan yang mereka emban di bidang masing-masing
4. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu.<sup>2</sup> Mereka dipilih secara musyawarah (coblosan) dan mendapat persetujuan dari Kepala desa, juga masyarakat dalam wilayah satu kelompok desa yang terdiri dari beberapa rukun warga dan dusun.

Sedangkan nama-nama jabatan dalam struktur organisasi pemerintah desa menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan :
  - a) Kepala Urusan Bidang Umum.
  - b) Kepala Urusan Pemerintahan.
  - c) Kepala Urusan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

---

<sup>2</sup> I Nyoman Baratha, *Desa, Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal 44-45.

d) Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan dan Kebudayaan Masyarakat Desa.

#### 4. Kepala Dusun.

Membawahi beberapa rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) serta dusun-dusun yang ada dalam satu kelurahan.<sup>3</sup>

Kepala desa atau lurah desa adalah penguasa tertinggi dalam pemerintahan desa. Jalannya pemerintahan desa dilaksanakan oleh lurah desa dengan dibantu perangkat desa atau sering disebut pamong desa, seperti terlihat dari kutipan sebagai berikut ;

“.....Kang dadi panggedening desa iku abdi dalem lurah desa, kawajibane nindakake paprentahan tumrap bawahing desa mau kabiyanu punggawa desa, .....”

Terjemahan, “..... Penguasa tertinggi desa adalah lurah desa, tugasnya menjalankan pemerintahan desa dengan dibantu punggawa desa, atau pamong desa.....”<sup>4</sup>

Lurah desa dibantu beberapa orang yang merupakan andhahan atau bawahan yang wajib mengikuti dan melaksanakan dalam menjalankan pemerintahan. Pembantu lurah desa tersebut biasa disebut pamong desa yang terdiri dari; sekretaris desa (carik), kepala kampung (kamituwo), kaum (modin), kepala dusun (Kabayan), kaur pemerintahan dan kemakmuran (ulu-ulu), kaur

---

<sup>3</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal 49.

<sup>4</sup> Pengertian atau sebutan kepala desa di wilayah Kabupaten Klaten biasa disebut lurah desa, selanjutnya penggunaan kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama. Lihat *Rijksblad Soerakarta*, 1938 nomer 10.

pembangunan dan kaur kesra (PTD).<sup>5</sup> Dalam menjalankan pemerintahan desa, pamong desa mengadakan hubungan atau konsultasi dengan badan milik desa yang mewakili masyarakat desa, yaitu Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dimana anggotanya adalah pejabat pemerintahan desa dan orang yang dipilih masyarakat, biasanya mereka merupakan orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar atau merupakan elit desa.

Usaha-usaha dalam pembangunan desa yang mencakup berbagai bidang kegiatan sektor kehidupan masyarakat tidak lepas dari peranan pemimpin daerah tersebut dimana kepemimpinan berlangsung. Seperti yang diutarakan oleh Buddy Prasadja dalam skripsinya dan kemudian dibuat buku berjudul “Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya” tahun 1982 menyatakan :

“.....Salah satu kenyataan yang tidak dapat diingkari ialah bagaimanapun juga pola pembangunan suatu desa masih tergantung kepada peran pemerintahnya, sehingga keberhasilan pembangunan suatu desa berhubungan erat dengan struktur pemerintah desa tersebut.....”<sup>6</sup>

Pengaruh kekuasaan dari pemerintah desa terhadap pembangunan juga ditentukan oleh kategori kekuasaan pemimpinnya. Dasar-dasar kepemimpinan sebagai landasan status pemimpin menimbulkan pola operasional yang berlainan. Di sinilah peranan pimpinan desa merupakan sebagai bentuk pimpinan legal atau resmi dari tingkat pemerintahan yang memiliki dasar-dasar kekuasaan dan kewenangan formal sebagai pelaksanaan pemerintahan. Jabatan Kepala Desa

---

<sup>5</sup> Istilah tersebut dipergunakan oleh Sumber Saparin dan Bayu Surianingrat, sedang Suhartono menyebut *Prabot Desa*.

<sup>6</sup> Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali, hal 115.



bersama pamongnya merupakan kedudukan yang disegani dan dihormati oleh rakyatnya, letak penghormatan ini berhubungan erat dengan posisi hierarki dalam jabatan pemerintahan pada tingkat desa ini. Rakyat secara sadar berkewajiban untuk menyumbangkan tenaga didalam gotong royong untuk suatu pekerjaan desa, semua dikerjakan atas ikatan komunal yang ada, hal ini menunjukkan adanya keakraban hubungan melalui pengaruh sosial antara pimpinan desa dan masyarakat desa.

Dalam hubungan masyarakat dengan perangkat desa atau pamong desa terdapat hubungan saling membutuhkan seperti dalam konsep hubungan *patron and Client*. Dimana rakyat atau penduduk bertindak sebagai *klien* atau buruh sedangkan aparatur pemerintah bertindak sebagai *patron* atau penguasa, majikan. Jadi peranan dari pihak pemerintahan desa sangatlah besar dalam bidang pertanian yang ada di daerah Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten

## **B. Kepemimpinan Desa dalam Masyarakat di Bidang Pertanian**

Sebelum dijelaskan mengenai kepemimpinan desa secara khusus, terlebih dahulu akan penulis kemukakan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan antara lain: definisi pemimpin menurut Dr Abdulrachman, dalam desertasinya bulan Juni 1962 menulis bahwa “pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan orang-orang lain di sekitarnya (kelilingnya, bawahannya dalam pengaruhnya) untuk mengikuti pimpinan itu”.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Kartini Kartono, “Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kelebihan sehingga dia

---

<sup>7</sup> M. Karyadi, *Kepemimpinan (Leadership)*. Bogor: Politeia, 1981, hal. 4.

mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahannya, sehingga dapat menggerakkan bawahannya dan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tertentu”.<sup>8</sup>

Pamong Desa mempunyai tugas secara umum dan mempunyai tugas khusus menurut kedudukan dari pamong tersebut. Tugas-tugas tersebut sudah ditentukan dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah. Secara sederhana susunan dan tugas dari tiap-tiap pamong pada pemerintahan desa menurut Maklumat No. 16/ tahun 1969 adalah sebagai berikut:

1) Lurah desa sebagai Kepala Desa

Mengkoordinir, membimbing dan memimpin kepala-kepala bagian. Membuat rencana kerja. Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja (RAPBK). Memberikan disposisi atau menandatangani surat-surat yang dikerjakan masing-masing kepala bagian. Bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya kas desa. Menjalankan tugas lain yang tidak dilakukan oleh masing-masing kepala bagian, misalnya menggugat perkara. Di bidang pertanian kepala desa memiliki kekuasaan penuh dalam mengadakan pertanian di wilayahnya, dimana dari petugas yang telah ada bertanggung jawab pada lurah desa. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan pertanian sesuai dengan aturan yang diketahui dan dimiliki dari hasil pertemuan dan pelatihan yang diberikan dari Dinas Pertanian Rakyat melalui Badan

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press, 1983, hal. 33-34.

Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) yang diberikan secara rutin tiap bulan sekali di kantor BPMD atau kantor kecamatan.

2) Kamituwo sebagai Kepala Bagian Umum

Sebagai wakil lurah jika lurah desa berhalangan. Mengurusi dan mengerjakan bidang sosial. Mengurusi pendidikan dan pengajaran. Mengurusi urusan sanitasi yang ada di desanya.

3) Carik sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan

Mengerjakan tata usaha desa, mengerjakan urusan keluar masuknya surat-surat dengan pegangan agenda umum. Mengerjakan tentang administrasi tanah dan mencatat keluar masuknya keuangan. Mengerjakan urusan atau masalah pembangunan yang ada di desanya. Mengerjakan urusan rapat-rapat desa dengan sesama pamong maupun dengan masyarakat. Menangani urusan perlengkapan dan inventarisasi desa.

4) Ulu-Ulu sebagai Kepala Urusan Bagian Kemakmuran.

Menangani segala urusan pengairan atau irigasi dalam bidang pertanian serta perkebunan. Mengatur kegiatan dengan membuat jadwal dari petugas khusus pengairan, misalnya menentukan seseorang sebagai ketua kelompok tani mengatur petani kelompoknya. Mengerjakan urusan perikanan dan peternakan, urusan perekonomian desa dan menangani urusan jual beli hasil panen maupun hewan ternak.

5) Jogoboyo sebagai Kepala Bagian Keamanan.

Menangani urusan keamanan dan ketentraman desa, keorganisasian, perondaan, pertahanan dan mengusut perkara serta menjaga keamanan desa.

6) Kaum (modin) sebagai Kepala Bagian Agama

Menangani masalah keagamaan dan pembinaan mental, urusan peribadatan. Mengurusi masalah kematian. Menangani masalah perkawinan, *talak* dan *rujuk*. Selain itu juga dalam mengurus tempat-tempat peribadatan seperti pembangunan mushola, langgar, masjid dan mengatur kegiatan keagamaan seperti pengajian, kumpulan yassinan dan sebagainya.

7) Kebayan sebagai Kepala Dusun.

Kepala dusun mempunyai tugas atas nama Kepala Desa maupun pamong desa yang lain, untuk disampaikan kepada rakyat. Menyampaikan aspirasi dan surat-surat yang datang untuk penduduk di wilayahnya serta mengurus pembagian surat tagihan dan melakukan penarikan pajak.

Pembagian tugas terperinci dalam pamong desa, diharapkan dapat memperlancar proses kinerjanya dalam melaksanakan pembangunan desa. Mengingat tugas yang dibebannya cukup berat, maka pamong desa harus betul-betul orang yang cerdas, adil, bijaksana, jujur, cakap memimpin dan berwibawa serta mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Juga dengan pembagian tugas dari pamong desa tersebut mereka memiliki tugas khusus didalam pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan bidang masing-masing. Akan tetapi dalam melakukan kerja dan peranan antara pamong satu dengan yang lainnya saling berikatan erat dan bekerjasama, tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan suatu program yang dilaksanakan.

Masyarakat petani didaerah penelitian tidak banyak berspekulasi mengenai kehidupan dan tidak mempunyai tradisi untuk berpikir banyak tentang

kehidupannya terutama dalam bidang pertanian, mereka sangat percaya akan nasib. Mereka memandang hidup sebagai serangkaian penderitaan dan harus selalu menyadarinya. Hal ini terlihat bilamana petani mendapat kerugian, kemerosotan, gagal panen akibat adanya hama tanaman dan bencana alam, mereka hanya pasrah terhadap kejadian yang menimpanya. Petani merasa takut dan segan terhadap atasan, terutama pejabat pemerintahan dan pegawai yang berasal dari kota atau luar daerah. Sikap pasif petani yaitu menerima nasib dan tunduk kepada kekuasaan birokrasi dengan ketidakberdayaan mereka, khususnya petani tua atau lanjut-usia dengan budaya tradisionalnya. Perkembangan pertanian akibat kemajuan ilmu pengetahuan tidak juga menghapus sikap-sikap narimo atau pasrah, dimana sikap ini terdapat pada sebagian besar petani kecil dan buruh tani.

Pelaksanaan pertanian di Kecamatan Delanggu pada umumnya tidak berbeda jauh dengan pertanian di daerah sekitarnya. Peranan aparat pemerintahan desa seperti Pamong Tani Desa dan Ulu-ulu sangat besar. PTD berperan mengatur kegiatan para petani dalam mengolah lahan mereka dan menentukan kebijakan dalam menggunakan serta dalam memperoleh bibit padi, sedangkan *ulu-ulu* mengatur pengairan, yaitu membagi dan mengatur tujuan aliran air irigasi dari umbul cokro disalurkan kelahan mana yang di prioritaskan agar lahan petani dapat memperoleh air irigasi secara teratur dan adil. Mereka memperoleh arahan dari kepala desa sebagai koordinator kegiatan. Dalam hal ini, setiap melakukan kebijakan pertanian misalnya pembagian aliran irigasi (sistem giliran), jenis-jenis padi yang mau ditanam, pembuatan saluran irigasi dan sebagainya. Sistem pengairan yang dikenal yaitu *darma tirta* juga mendapat pengaruh dari

keberadaan pamong desa terutama kepala desa seringkali di beberapa desa dijadikan ketua organisasi *darma tirta* tersebut.

Salah satu uluran tangan pemerintah dalam pertanian, ialah pemberian penerangan atau penyuluhan pertanian yang dilakukan secara masal. Dalam wilayah Kabupaten Klaten dipekerjakan sebanyak 460 petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL). Mereka bekerja di daerah pedesaan dan melayani lebih dari 200.000 petani. Dalam dua masa Pelita sejak 1969/1970, praktis semua program pembangunan pemerintah untuk pedesaan antara lain Bimas, BUUD, KUD, UDKP, Inmas dan berbagai Inpres dilaksanakan dibawah pimpinan dan pengawasan serta pengendalian Pamong Desa. Penyaluran kredit sekalipun tidak terlepas dari jaminan pamong desa. Organisasi yang ditanam dari atas desa seperti kontak tani, kelompok tani disalurkan melalui gugus birokrasi desa.

### **C. Proyek Pertanian “Tani Makmur” dalam Peningkatan Produksi Padi**

Berita mengenai kurangnya penyediaan bahan makanan pokok beras dan benih mulai nampak pada akhir tahun 60-an, seperti diberitakan dalam harian Kompas tanggal 2 Mei 1979. Kekurangan bahan pangan sangat membuat permasalahan bagi masyarakat pada umumnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Menurut Annebooth, ada tiga faktor yang memberi sumbangan terhadap perkembangan produksi beras di Indonesia yaitu: pertumbuhan daerah tanam, pertumbuhan rasio tanam (rasio panen terhadap wilayah tanam) dan pertumbuhan panen untuk tiap unit daerah panen. Tiga faktor atau komponen itu mengacu pada

ekstensifikasi, intensifikasi dan tahap-tahap panen. Ketiga faktor ini berjalan secara berurutan.<sup>9</sup>

Segala daya upaya dikerahkan untuk meningkatkan produksi padi. Berdasarkan angka statistik dari Dinas Pertanian Klaten tahun 1971, kenaikan produksi padi dalam tahun 1968 dibandingkan dengan tahun 1967 tercatat 37,5 % peningkatan hasil panen padi. Jika pada tahun 1967 dengan jenis unggul lokal, rata-rata hasil padi 43 kwintal per hektar, dengan menggunakan bibit padi jenis P.B.5 dan P.B.8 rata-rata dapat menghasilkan 85 kwintal per hektar, petani mendapatkan kenaikan produksi sebesar seratus persen. Dalam program peningkatan produksi pertanian khususnya padi Kabupaten Klaten tahun 1968 telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 38.350.368,49 yang perincian adalah sebagai berikut:

**Tabel.III.1**

**Pembiayaan Usaha Peningkatan Produksi Padi di Klaten Tahun 1968**

No	Nama Proyek	Banyaknya Proyek	Pengeluaranya (Rp)
1	Dam	57	21.582.899,80
2	Saluran air	64	10.292.463,19
3	Sumber air	16	3.885.837,50
4	Pompa air	3	2.289.168,-
Jumlah		100	38.350.368,49

Sumber : Laporan Bupati Tk I Klaten 1969.

Pembiayaan untuk peningkatan produksi padi di Klaten tersebut di atas merupakan usaha dari pemerintah daerah tingkat I Kabupaten Klaten sebagai tanggapan dan anjuran dari pemerintah pusat. Promosi pertanian dalam Bimas Baru yang dikenal sebagai *proyek tani makmur* mengikuti pola yang sudah ada

---

<sup>9</sup> Annebooth, *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 1988, hal 36-76.

dalam program Bimas Gotong Royong tahun 1971. Kabupaten Klaten penduduknya sebanyak 975.600 jiwa dalam wilayah seluas 626,6 km<sup>2</sup>, hanya 35 persen dari 211.416 keluarga tani memiliki tanah sendiri. Umumnya lahan digarap berdasarkan sistem bagi hasil. Sebanyak 97 % penggarap mengusahakan lahan yang luasnya kurang dari satu hektar, malahan di banyak desa rata-rata luas tanah garapan mungkin hanya 0,2-0,4 hektar saja. Lahan sawah, tegalan bersama-sama dengan lahan pekarangan dalam pengolahannya diusahakan menguasai pola usaha tani. Untuk mengetahui kegunaan tanah dan lahan di Kabupaten Klaten, lihat tabel di bawah ini :

**Tabel III. 2**  
**Tata Guna Tanah di Kabupaten Klaten Tahun 1971**

Jenis penggunaan tanah	Luas tanah
Lahan pertanian tadah hujan	7.197 ha
Lahan pekarangan	17.681 ha
Lahan kayu-kayuan dan semak belukar	1.176 ha
Lahan pertanian irigasi	35.586 ha
Jalan, sungai dan sebagainya	1.020 ha

Sumber : Dinas Pertanian Klaten 1971

Dari tabel di atas, menjelaskan wilayah Kabupaten Klaten memiliki lahan pertanian sawah basah teririgasi cukup luas dan cocok untuk program pengembangan produksi padi. Untuk itu wilayah Kabupaten Klaten dijadikan daerah percontohan atau *pilot project* pertanian padi dari pemerintah pusat yang bekerjasama dan mendapat bantuan dari pemerintahan Jerman. Dimana nantinya hasil yang diperoleh akan diterapkan di wilayah lainnya di seluruh nusantara. Tanah yang sudah dianggap kritis pun dijadikan lahan pertanian, ditanami padi huma/gogo, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sayuran. Daerah yang kurang



menguntungkan untuk produksi padi terdapat di daerah lereng Gunung Merapi dan dibagian sebelah selatan Klaten seperti di Kecamatan Bayat, Gantiwarno.

Usaha pembangunan pertanian mendapat kerjasama, dukungan dan disponsori dari pemerintah Jerman Barat tersebut yaitu mulai dengan menyediakan sumber dana untuk membeli dan menunjang sarana produksi. Untuk memperjelas adanya penerimaan dan penggunaan bantuan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah Jerman, lihat tabel berikut.

**Tabel III. 3**  
**Penggunaan Sarana Produksi 1968/69 sampai 1970/71.**

Barang	Sumbangan dari Jerman	Sumbangan Indonesia	Total
Benih	-	281 t	281 t
Pupuk	7.300 t	2.018 t	9.319 t
Insektisida	3.150 kg	18.368 kg	21.518 kg
Pestisida (racun tikus)	800 kg	863 kg	1.663 kg
Alat semprot	175 semprotan	154 semprotan	320 semprotan
Perlindungan tanaman dengan helicopter	2.185 ha	-	2.185 ha

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Klaten 1971

Tabel di atas menggambarkan besarnya sumbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan Jerman yang diberikan dalam bentuk barang dari kesekurutan total dana bantuan yang diberikan. Pemberian bantuan berupa benih yang diberikan diambil dari hasil penelitian dan produksi dari Lembaga Penelitian Padi di Bogor yang disesuaikan dengan wilayah yang digunakan penanaman jenis padi tersebut.

Dana bantuan dari pemerintah Jerman tersebut digunakan untuk memasok atau membeli 4 buah gerbong kereta (lori), satu traktor, satu sepeda motor dan 100 sepeda serta untuk pembelian mesin-mesin penggilingan padi. Jumlah bantuan ini meliputi 3,5 juta DM (Deutch Mark). Dari bantuan tersebut

digunakan terutama untuk meningkatkan produktifitas padi, serta memperlancar hubungan antara instansi terkait dengan masyarakat petani oleh para penyuluh pertanian.

Lahan yang digunakan sebagai lahan percontohan *proyek tani makmur* seluas 15.000 hektar terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Proyek yang dilakukan yaitu menggalakkan sistem pertanian dengan menggunakan bibit padi jenis baru seperti PB (Peta Baru) 5 dan PB 8 sebagai bibit unggul nasional dari IRRI, jenis-jenis bibit padi yang digunakan petani (lihat lampiran). Kecamatan Delanggu sebagian besar masyarakat petani masih menggunakan jenis padi lokal seperti padi *rojolele*, *cempo*, *pari genderuwo*, *ketan*, *pari wulu* dan sebagainya

Sebelum proyek pemerintah Jerman dimulai, sistem jaringan penyaluran pupuk dan benih telah direncanakan. Dengan memperhitungkan sarana transportasi, jarak antara areal pertanian dengan sumber penyaluran tidak boleh lebih dari 5 kilometer. Untuk keperluan ini telah dibangun 57 buah kios pupuk dan penyalur benih untuk menunjang perluasan jaringan kerja. Distribusi ditingkat grosir hanya ditangani oleh sejumlah badan usaha milik negara yang lebih cenderung untuk mensuplai pada toko-toko miliknya di tempat tertentu. Untuk lebih menjangkau petani kecil di pedesaan dibentuk penyalur benih perorangan agar terjadi efisiensi kerja dan cepat dalam penyalurannya kepada para petani. Adapun penyalur benih padi unggul secara perorangan di tiap kecamatan untuk lebih lengkapnya lihat lampiran.

Padi varietas unggul nasional ini memiliki umur lebih pendek daripada bibit padi lokal. Tinggi tanaman tidak mencapai satu meter, hal ini bertujuan untuk menghindari burung-burung kecil dapat hinggap pada batang padi. Kondisi demikian berpengaruh pada besarnya populasi burung sebagai hama padi. Sementara umur yang pendek, agar petani dapat menanam padi lebih banyak yaitu dapat menanam tiga kali setahun, sedang jenis padi lokal hanya dua kali panen setahun. Tetapi hal ini mempunyai efek menurunnya produktifitas tanah, karena mikroba yang mampu menyuburkan tanah makin berkurang jumlahnya. Selain itu pengaruhnya pada petani yang dahulunya dapat menuai padi dengan berdiri, sekarang terpaksa harus jongkok, secara biologis memerlukan energi yang lebih besar.

Petani tradisional dengan kebiasaan menanam bibit lokal merasa enggan melakukan himbauan itu. Nilai-nilai tradisi yang terkandung dalam mitos “Dewi Sri” melekat pada diri petani tersebut. Selain alasan mistis, keengganan petani karena adanya “*taste transfer*” atau pengurangan rasa atau nilai yang ditimbulkan dengan penanaman padi unggul jenis baru, mereka beranggapan nasi jenis lokal memang lebih jauh rasanya dan kegunaan dibanding padi jenis baru. Bercocok tanam padi jenis baru merupakan keharusan dalam memperoleh hasil tinggi dan keuntungan yang lebih tinggi.

Petani yang lahan sawahnya dekat dengan jalan utama desa menuju kecamatan atau berdekatan dengan kantor kepala desa, diprioritaskan menuruti pamong desa untuk menanam sawahnya dengan bibit unggul yang dianjurkan. Pamong desa menganjurkan ini agar para “*turis-turis pedesaan*” seperti

digambarkan oleh Robert Chambers (1981), yaitu para pejabat pemerintahan, para penyuluh pertanian dan peneliti pedesaan yang datang ke desa mempunyai kesan bahwa petani bersedia mengikuti anjuran pemerintah. Petani yang letak sawahnya jauh dari jalan utama dan balai desa, merasa bebas untuk menanam bibit padi jenis lokal maupun bibit unggul lainnya sesuai keinginan petani sendiri.<sup>10</sup>

Dalam tahun 1970/1971, petani yang berpartisipasi dan mengikuti program intensifikasi dibantu memperoleh pinjaman khusus sarana produksi untuk setiap hektar lahan pertanian yang digarapnya seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut ini.

**TABEL III. 4**  
**Paket Kredit per hektar Lahan Garapan dalam Tahun 1970/1971**

Uraian	Dengan bibit unggul		Tanpa bibit unggul	
	Jumlah	Nilai, Rp <sup>a</sup>	Jumlah	Nilai Rp
Urea	200,0	5.320	150,0	3.950
TSP	45,0	1.197	45,0	1.197
Insektisida	0,5	550	0,5	550
Racun Tikus	0,1	45	0,2	45
Benih Unggul	25,0	1.000	-	-
Subsidi biaya tenaga kerja	-	3.500	-	3.500
Jumlah bantuan	-	11.612	-	9.242
+1% bunga/bulan (total 7 bulan)	-	813	-	647
Pembayaran kembali	-	12.425	-	9.889

Sumber : Dinas Pertanian Klaten dalam tahun 1971

(ket<sup>a</sup> dalam tahun 1970/71 Rp 103,- setara dengan 1 DM )

Dalam kerangka program Bimas Baru “Tani Makmur”, hanya 50 persen dana bantuan yang disediakan benar-benar digunakan, karena adanya berbagai

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bp. M.Sunaryadi, pegawai BPIP Dinas Pertanian Klaten tanggal 10 Mei 2002.

kesulitan dalam prosedur permohonan kredit. Sejak dana bantuan proyek dari Jerman dimulai, bantuan diberikan dalam bentuk kredit kelompok. Kredit tersebut harus dikembalikan kepada Bank Pembangunan Indonesia 6 bulan setelah panen, dengan tingkat bunga sebesar satu persen perbulan. Hasil panen menguntungkan secara ekonomis memungkinkan petani untuk mengembalikan kredit secara penuh. Pembayaran kredit petani secara cepat dan lancar juga disebabkan atas dorongan dan kerjasama pamong desa. Sampai kredit lunas dibayar, lurah bertanggung jawab atas akad kredit petani dan sistem pembayarannya. Selama tahun pertama proyek, perubahan bentuk kredit perorangan menjadi kredit kelompok memungkinkan penyelesaian seluruh permohonan kredit dalam waktu 6 minggu. Dana bantuan dan kredit petani terutama digunakan untuk pembangunan sarana irigasi, pembangunan tempat penyuluhan, subsidi administratif desa dan untuk pembelian bibit padi serta biaya pengolahan sawah.

Dengan adanya proyek Tani Makmur dengan penggunaan teknologi di daerah Kabupaten Klaten meliputi berbagai bidang mulai pengelolaan tanah, irigasi, penggunaan bibit unggul yang mempunyai produktifitas tinggi, pengaturan pola tanam, serta penggunaan pupuk buatan dan pestisida. Dengan diterapkan sistem panca usaha tani sejak tahun 1970, kemungkinan terjadi gagal panen menjadi berkurang, sehingga produksi padi meningkat drastis. Di samping itu, produksi padi dalam setiap hektarnya juga dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel berikut ini;

**Tabel III.5**  
**Luas Panen Padi Yang Berhasil dan Produksi Padi**  
**Di Kabupaten Klaten 1968-1979**

Tahun	Luas Panen Padi (Ha)	Produksi Padi (ton)
1968	48.898	236.090
1969	50.809	266.985
1970	52.916	275.919
1971	53.831	294.668
1972	54.421	298.792
1973	54.057	274.962
1974	59.389	301.561
1975	53.545	267.134
1976	47.528	195.838
1977	58.059	281.909
1978	64.360	305.612
1979	58.869	276.999

Sumber : Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Klaten 1980.

Dari data-data tersebut di atas dapat diketahui bahwa produksi padi sawah di daerah Klaten cenderung mengalami peningkatan. Selama tahun 1968 sampai dengan tahun 1974 terjadi peningkatan sebanyak 65.471 ton. Hal ini antara lain disebabkan karena luas lahan padi yang dipanen juga terjadi peningkatan, yaitu seluas 9.491 hektar. Sementara itu pada tahun 1976 produksi padi di Kabupaten Klaten mengalami titik terendah yaitu 195.839 ton. Hal ini disebabkan karena luas lahan padi yang berhasil dipanen juga berada pada tingkat terendah yaitu hanya 47.528 hektar. Rendahnya produksi padi pada tahun 1976 disebabkan karena kemarau yang terlalu panjang, sehingga banyak sumber air dan sungai-sungai yang digunakan untuk irigasi menjadi kering. Kemungkinan lainnya adalah karena terjadi serangan hama padi, misalnya sundep, wereng dan tikus yang menyebabkan puso atau gagal panen.<sup>11</sup> Namun demikian pada tahun 1978

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ir Hadi Soetomo, Op Cit.

produksi padi mengalami peningkatan kembali menjadi 305.612 ton dengan luas panen 64.360 hektar.

#### **D. Usaha-Usaha Pamong Desa dalam Produksi Padi**

Dalam pelaksanaan proyek pertanian *tani makmur*, pamong desa merupakan elit pedesaan disamping tokoh pedesaan yang ada. Pamong desa adalah yang membawa masukan-masukan baru dan penggunaan jenis-jenis padi yang diperoleh melalui bimbingan dalam BPMD yaitu kerjasama pemerintah dengan Dinas Pertanian. Selain tak tertutup juga adanya petani yang mempunyai lahan tanah sawah yang luas dan modal cukup besar yang disebut *petani maju* juga mempunyai peran dalam hal penentuan jenis padi pada lahan persawahan mereka. Hal ini karena mereka mempunyai pengetahuan dan hubungan cukup luas pula akibat sering melakukan perjalanan (baik wisata maupun tugas kewajiban) dan mengadakan hubungan dalam proses pertanian dengan pihak luar daerah.

Para pamong desa disarankan oleh camat atau pihak atasan dengan diwajibkan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan, kursus-kursus serta diklat (pendidikan dan latihan) di kantor kecamatan, atas prakarsa dari Dinas Pertanian Klaten. Dalam kegiatan ini pamong desa diharapkan mampu menyerap dan menyampaikan tentang inovasi-inovasi di bidang pertanian yang berkembang. Training atau pelatihan dilaksanakan setiap dua minggu sekali di kantor BPMD sekarang BPP di tiap kecamatan, yaitu tiap hari Jum'at dan Sabtu pada minggu ke-II dan minggu ke-IV. Penggunaan teknologi dan inovasi pertanian meliputi berbagai bidang mulai dari pengolahan tanah, irigasi, penggunaan bibit unggul,

pengaturan pola tanam, serta penggunaan pupuk buatan dan pestisida serta adanya koordinasi bidang irigasi antar kelurahan.<sup>12</sup>

Proyek *Tani Makmur* bertujuan menumbuhkan minat dan menanamkan ketrampilan serta kemampuan petani menerapkan teknologi baru. Penerapan teknologi baru pertanian seperti menggunakan bibit-bibit padi unggul jenis baru berbeda dengan jenis padi lama, dimana proyek ini harus dilaksanakan secara intensif, berulang dan berencana. Penyampaian teknologi baru pertanian dan penggunaan bibit jenis-padi baru dilakukan melalui beberapa pihak antara lain :

1. Pemerintahan Desa.

Kegiatan dimulai dari usaha menumbuhkan kesadaran, perhatian dan minat daripada petani. Selanjutnya diikuti dengan kegiatan untuk mengajarkan ketrampilan serta memberikan latihan pada kelompok tani, sehingga kemampuan tehnik dan kepemimpinan dari para kontak tani dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai potensi penggerak untuk melaksanakan teknologi bercocok tanam secara lebih modern. Dalam kegiatan pertanian ini pamong desa mempunyai beberapa fungsi penting dalam penyampaian program pemerintah. Adapun fungsi pamong desa di bidang pertanian tersebut antara lain:

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ir. Hadi Sutomo (pegawai Dinas Pertanian Klaten dan BPP Delanggu tahun 1976-1986), tanggal 16 Februari 2002.



a. Sebagai fasilitator

Fungsi pamong desa yaitu mempercepat pengesahan dan memberikan penjelasan rencana dan program baik yang berasal dari tingkat pusat maupun dari pemerintah daerah. Memberikan fasilitas proyek yang dibutuhkan petani, juga memberikan arahan dan memotifasi petani, karena petani kurang mengerti secara tepat dan cepat bagaimana dan kepada siapa berhubungan baik birokrasi, lembaga maupun dengan pihak dari luar daerah.

Memberikan dan mengusahakan bantuan modal baik berupa barang maupun keuangan secara cepat dan tepat, serta mencari sumber dana lainnya, untuk mempercepat proses dalam mewujudkan program yang akan dilakukan. Salah satunya yaitu dengan melancarkan kredit dari KUD maupun dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang digunakan petani untuk mengelola lahan pertaniannya supaya berhasil dengan baik.

Mendorong koordinasi antara petani dan petugas dari Dinas Pertanian, dalam hal ini kepala desa menyelenggarakan dan menyediakan tempat untuk pertemuan antara petani dengan para penyuluh pertanian yang telah ditugaskan dari Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. Menetapkan jadwal pertemuan dan menggerakkan petani supaya bisa hadir tepat pada waktunya.

Membantu menyediakan sumber daya manusia, peralatan-peralatan yang diperlukan demi kelancaran program serta menjadi salah satu tempat

penyalur dan penampungan barang pendukung pertanian padi seperti benih padi, pupuk dan sarana transportasi.

b. Sebagai Mediator

Peranan pamong desa sebagai mediator merupakan saluran penyambung antar bidang-bidang yang terkait dengan pertanian. Oleh karena itu keberadaan pamong sangat diperlukan oleh para petani. Para pamong desa berusaha menengahi dan menjembatani usaha pertanian dengan menciptakan suatu suasana yang konduktif antara petani dan petugas penyuluh pertanian.

Pamong desa memberikan alternatif-alternatif atau pendekatan pada petani, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan lahan sawah baik milik pribadinya dan *tanah bengkok* atau *tanah lungguh* serta *tanah kas desa* sebagai lahan percontohan, sesuai dengan himbauan atau intruksi dari pejabat pemerintah di atasnya yaitu himbauan dari camat dan bupati yang diberikan saat pertemuan-pertemuan resmi pemerintahan. Instruksi dari pemerintah di atas desa dilakukan dengan adanya himbauan khusus kepada pejabat baik secara langsung maupun tidak langsung. Luas lahan percontohan yang digunakan antara satu desa dengan desa yang lainya berbeda luas dan letaknya, lahan itu dicari menurut tempat yang sesuai dan cocok digunakan sebagai lahan percontohan tersebut.

c. Sebagai Inovator

Pamong desa merupakan penggerak dan mevitofasi terhadap perkembangan teknologi serta memberikan dorongan petani untuk

menerapkan dan menggunakan bibit padi baru pada petani. Menyusun program dan memungkinkan untuk membentuk lembaga, memberikan contoh secara terus menerus untuk menunjukkan orientasi pembangunan desa yang berkelanjutan, sehingga dapat dirasakan sampai pada petani kecil, serta membuat peraturan-peraturan tersendiri terhadap wilayah kewenangan masing-masing. Pamong desa berinisiatif memberikan waktunya untuk melakukan pertemuan baik secara formal dan informal. Secara formal, mengadakan pertemuan rutin *tiap lapangan* atau 35 hari dengan petani disesuaikan dengan persetujuan antara petugas penyuluh dan petani, jadwal pertemuan antar kelompok tani antar desa berlainan. Jadwal pertemuan biasanya ditentukan berdasarkan atas hari pasaran (pon, wage, kliwon legi, pahing). Misalnya pertemuan rutin setiap sabtu wage pada jam 10.00 WIB di balai desa Jetis, selasa wage di *los* atau *brak* yang telah dibuat terletak pada tengah sawah dekat tanah lungguh desa Butuhan. Pertemuan diselenggarakan di lokasi persawahan yang telah dibangun los atau gardu berkat bantuan Pemda melalui Dinas Pertanian dan dana sukarela petani, yang mana tempat tersebut disediakan untuk tempat pertemuan para petani dengan para penyuluh pertanian.<sup>13</sup> Pertemuan secara nonformal, pamong desa mengadakan pertemuan tidak terjadwal waktu dan tempatnya. Pertemuan dilakukan secara berkelompok maupun perseorangan antara para pamong desa dengan petani. Penyampaian

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bp. Soekari H.S, Kepala Dusun I (bayan) Desa Butuhan periode tahun 1976-sekarang.

pengetahuan juga dilakukan dalam kesempatan warga berkumpul seperti dalam *jagongan* atau *kendurenan* atau dalam perjumpaan serta obrolan di warung maupun pos perondaan sewaktu mengontrol keamanan daerahnya.

## 2. Pihak pemerintah dari pusat.

### a. Departemen Pertanian

Program pertumbuhan produksi beras melibatkan instansi dari tingkat pusat maupun daerah. Departemen pertanian memiliki badan di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini menteri pertanianlah yang memiliki tanggung jawab penuh di bidang pertanian. Ia bertanggung jawab atas bidang pertanian kepada presiden. Dalam melakukan kebijakan di bidang pertanian, menteri pertanian mengadakan koordinasi dengan presiden selaku *kepala negara* yang bertanggung jawab atas semua kebijakan dan pembangunan wilayahnya. Maka pemerintah membentuk Balai Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) dan petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang ditugaskan untuk memberikan arahan dan menyalurkan berbagai kemajuan teknologi pertanian dan program pengembangan pertanian kepada para petani di pedesaan.

Pelaksanaan pengembangan pertanian salah satu usahanya yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan pihak yang bersangkutan seperti instansi-instansi pemerintahan di desa. Pamong desa merupakan unsur pejabat pemerintahan yang sering kali bahkan tiap hari yang langsung berhubungan dengan para petani di pedesaan, merupakan ujung

tombak dari berjalanya program peningkatan produksi pertanian. Mereka dibebani untuk menyampaikan pengetahuannya pada tiap petani.

b. Badan atau lembaga-lembaga resmi pemerintah

Badan atau lembaga pemerintah merupakan bentuk pembantu kelancaran program ini, diantaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Koperasi Unit Desa (KUD), Usaha Unit Desa (UDKP), Kredit Bibit Desa (KBD), Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Badan Urusan Logistik (BULOG), serta institusi penyuluhan diantaranya BPIP bertempat di Jogopuring Ketandan yang membawahi BPP di tiap kecamatan.

Dalam hal perbenihan di Kabupaten Klaten terdapat dua badan atau lembaga perbenihan, yaitu:

- 1) Balai Benih Padi di Kabupaten Klaten antara lain: di Kebun Benih Humo sebelah selatan kantor Dinas Pertanian seluas 7,3770 Ha, setiap tahunnya rata-rata memproduksi benih padi 43.001 kilogram gabah benih. Jumlah ini memang jauh dalam pemenuhan kebutuhan benih untuk seluruh wilayah persawahan seluruh Kabupaten Klaten, dimana petani memerlukan benih padi sekitar 1.570,575 ton benih. Untuk itu membutuhkan swadaya masyarakat petani dan pihak luar untuk menangkan benih padi sehingga kebutuhan benih tercukupi. Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Benih serta Badan Penelitian dan Stratifikasi Benih Padi di Klewer, Tegalondo Kabupaten Sukoharjo juga mendukung pemenuhan kebutuhan bibit padi. Dimana sebagian petani di daerah Delanggu membeli benih padi

langsung di Tegalondo tersebut, selain itu BPPSB juga mendistribusikan bibit padi hasil penangkaran ke toko-toko pertanian terdekat. Selain itu juga terdapat *Perum Sang Hyang Sri* yang terletak di Jogopuring sebagai gudang dan agen pemasaran dan yang terletak di Jogonalan sebagai pabrik pengolahan dan lahan yang cukup luas yaitu sekitar 5 hektar untuk memproduksi benih, kebun dinas yang terletak disekitar atau belakang kantor Badan Penyuluh Pertanian di tiap kecamatan, PT. Pertani sebagai produsen dan pedagang benih serta menyalurkan kepada daerah yang telah meminta diberikan benih, sedangkan petani sendiri merupakan inti dari pemenuhan benih. Dalam hal ini petani dalam memperoleh benih dengan cara memilih lahan yang memiliki hasil padi yang sangat memuaskan, disisihkan kemudian dijemur dan dipilih bulir-bulir gabah yang besar dan baik, dalam bahasa Jawa disebut *menthes* dengan cara *ditapeni*, setelah itu disimpan pada tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung dan air sampai pada saat benih akan digunakan atau ditaburkan pada lahan persemaian. Sebelum ditaburkan, gabah bibit direndam dalam air 2 malam 2 hari, setelah itu ditiriskan, baru dapat ditaburkan pada lahan persemaian yang telah diolah, untuk menghindari gangguan burung maka ditutup dengan jerami diatasnya. Dalam perencanaan pemenuhan benih atau bibit padi di Kabupaten Klaten, Perum Sang Hyang Sri memproduksi benih sebanyak 40 %,

kebun benih dinas 3,50 %, produsen pedagang benih 6,50 %, penangkar benih 15 %, petani sendiri 35 %.

- 2) Kebun benih pembantu hortikultura di Pandes, seluas 1,7435 hektar, sepanjang tahun memproduksi bibit-bibit hortikultura, seperti jagung, kacang-kacangan, buah-buahan dan sebagainya. Keberadaan kebun benih tersebut adalah untuk menambah dan melengkapi lahan pertanian secara *tumpang sari*. Tanaman ini digunakan untuk menanam lahan atau kebun masyarakat di daerah yang kurang potensial seperti sawah adah hujan di musim kemarau untuk ditanami padi jenis tertentu seperti *padi gogo*, juga tanaman yang berguna untuk ditanam di *kebon* atau pekarangan supaya menambah penghasilan petani.

## **BAB IV**

### **KEBERADAAN PAMONG DESA DALAM “PROYEK TANI MAKMUR”**

#### **A. Pemerintahan Desa Sebagai Legitimasi Pemerintah Pusat**

Usaha pembangunan di daerah pedesaan boleh dikatakan sejak lama dimulai, terutama di bidang peningkatan hasil/produksi pertanian. Tetapi sampai sekarang ternyata para petani belum mau menerima secara sepenuhnya sistem baru/modernisasi pertanian yaitu mengenai penggunaan jenis-jenis bibit padi dianjurkan oleh pemerintah melalui Departemen Pertanian dalam meningkatkan hasil produksi padi untuk mencapai swasembada pangan. Dalam hal ini pemerintah berusaha menyediakan bibit unggul, pupuk, bahan pembasmi hama tanaman, subsidi/bantuan keuangan dan membentuk serta mengajarkan sistem, cara serta metode pengolahan pertanian dengan sistem *panca usaha tani* yang baik. Sedangkan pembangunan pertanian bagi pemerintah dengan peningkatan hasil produksi pertanian yang diistilahkan *Revolusi Hijau* atau *Green Revolution* adalah sangat penting peranannya, mengingat Indonesia sebagai negara agraris yang mengandalkan pertanian sebagai pokok perekonomian dan merupakan jumlah terbesar sebagai aktifitas penduduk. *Revolusi Hijau* merupakan suatu perubahan dan perkembangan cepat di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, terutama bahan makanan pokok yaitu beras, serta untuk mencapai swasembada pangan, sehingga Indonesia tidak mengimpor beras dari luar negeri secara besar-besaran lagi. Impor beras secara besar-besaran sehingga akan mengurangi devisa negara.



Indonesia dalam mencapai swasembada beras melalui perjuangan yang besar dan sangat panjang. Kegiatan peningkatan produksi beras oleh pemerintah Indonesia setelah *merdeka* dan mendapat kedaulatan dimulai dari *Rencana Kasimo* selama masa revolusi (1948-1950), dilanjutkan dengan Bimbingan Massal (Bimas) pada awal tahun 1960-an, kemudian berubah menjadi Bimas Gotong Royong pertengahan tahun 1960-an, Bimas Nasional atau Bimas Baru akhir tahun 1960-an, Intensifikasi Khusus (Insus) akhir tahun 1970 dan Supra Insus pada awal tahun 1980-an. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan swasembada beras di Indonesia, diantaranya adalah kebijakan politik, pendekatan sistem, penemuan teknologi, struktur pedesaan yang progresif, bimbingan massal, rekayasa sosial ekonomi dan program pembangunan yang terkoordinasi dengan baik. Oleh karena kebijaksanaan pemerintah di berbagai bidang merupakan prasyarat keberhasilan program peningkatan kesejahteraan rakyat. Komitmen kuat pemerintah dan kepemimpinan formal dalam masyarakat diantaranya yaitu peranan pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah terutama peranan pamong desa sangat diperlukan dalam program pembangunan pertanian tersebut.

Dalam pidato Presiden Soekarno pada ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1964 antara lain meminta supaya rakyat yang biasa makan nasi dua tiga kali sehari agar mengubah menu makanan “.....Campurlah makananmu dengan jagung, cantel, ketela rambat, singkong, ubi dan lain-lain,.....”, hal ini menjelaskan bahwa pada pertengahan tahun 1960-an Indonesia sedang mengalami kekurangan dan penurunan produksi bahan pangan, untuk itu perlu ditingkatkan produktifitas beras untuk masa yang akan datang. Himbauan

tersebut merupakan perintah tegas yang harus diindahkan oleh berbagai pihak yang terkait. Ketika harga beras terus melambung, Presiden Soekarno sekali lagi meminta agar dilakukan peningkatan produksi beras, juga perubahan menu makanan. Hal tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Kesra, Soedjarwo SH agar lebih mengutamakan pembangunan pertanian. Oleh karena permintaan tersebut bersifat penting maka beliau meminta agar Presiden menjadi tokoh utama pelaksana dalam pemberian mandat atau perintah dengan mengkomandokan kebijakan pembangunan pertanian serta harga bahan pangan di pasaran.<sup>1</sup>

Pada masa awal Orde Baru, peningkatan produksi beras menjadi prioritas utama, diperkenalkan pula *Revolusi Hijau*. Revolusi Hijau muncul sebagai penyelamat, karena mampu meningkatkan produksi secara signifikan, meskipun harus diikuti pembenahan-pembenahan system, sarana dan prasarana seperti: penyediaan air untuk irigasi yang teratur artinya pemerintah membangun waduk atau bendungan dan jaringan atau saluran irigasi serta memperbaiki sistem pertanian yang ada. Selain itu juga dengan menggalakkan bimbingan dan penyuluhan pertanian melalui petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) dengan mengajarkan sistem pertanian dengan nama *Panca Usaha Tani*. Hal tersebut membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti pupuk

---

<sup>1</sup> Ninuk M.P. *Ketahanan Pangan Bukan Cuma Peningkatan Produksi beras*. Kompas tanggal 28 September 1965.

organik, pupuk buatan, pestisida, penyediaan bibit alat-alat pertanian (spayer, traktor ) dan sebagainya.

Kebijaksanaan pertanian merupakan serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan utama kebijakan pertanian adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif dan efisiensi produk, akibatnya tingkat penghidupan petani berubah menjadi lebih tinggi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan khusus dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur dan lain-lain. Selain itu juga membuat anggaran-anggaran tersendiri untuk meningkatkan perkembangan sektor pertanian dan pembangunan bangsa terutama masyarakat desa, dimana petani merupakan lapisan masyarakat terbesar dan perbandingan jumlah penduduk terbesar dibanding lapisan masyarakat lainnya bukan petani.

Pada awal masa pemerintahan pimpinan Soeharto, yaitu akhir tahun 1960-an, timbul aliran pemikiran yang menggunakan bidang pertanian dan pangan sebagai alat politik. Hal tersebut timbul oleh karena pertanian terutama pertanian menghasilkan bahan pangan sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan manusia, juga dapat berfungsi sebagai bentuk pertahanan di bidang sosial dan keamanan bangsa. Perumusan dan pelaksanaan dari politik pertanian berhubungan erat dengan badan legislatif dan eksekutif dalam pemerintah. Oleh karena politik pertanian berhubungan erat dengan sistem pemerintahan suatu negara, maka

kebijakan pertanian atau politik pertanian merupakan satu bentuk *kegiatan masyarakat* atau *public action*, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, kesempatan ekonomi dan kehidupan masyarakat di pedesaan serta warga negara pada umumnya. Penggunaan bahan pangan sebagai salah satu senjata politik dalam melegalisasi keberadaan pemerintahan yang ada dan berlangsung di Indonesia, hal tersebut dilakukan secara efektif dan berencana. Perihal tersebut diatas merupakan salah satu bentuk usaha terpenting dari pemerintah dalam menyelenggarakan dan mempertahankan keberadaan pemerintahan dengan baik.

Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara agraris yang merupakan kawasan surplus sumber daya alam, berulang kali melakukan kebijakan bidang pertanian. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan sistem terbuka dan sistem tertutup. Artinya dalam sistem terbuka, pemerintah secara nyata dan terbuka dengan dikeluarkannya berbagai surat keputusan, instruksi-instruksi dan sebagainya, diantaranya berisi tentang program rencana untuk membuat dan melaksanakan proyek-proyek baru yang berhubungan dengan pertanian. Sedangkan kebijakan dengan sistem tertutup yaitu bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan atau melaksanakan program secara tidak langsung, tidak terwujud secara nyata. Adapun salah satu cara yang digunakan misalnya pemerintah menggunakan berbagai cara pendekatan yang tidak terlihat secara nyata contohnya; penggunaan pengaruh dari kekuasaan yang dimiliki para pejabat struktural pemerintahan berdasarkan tingkat kewenangan dan kekuasaan wilayah dalam sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia. Dengan

adanya kebijakan-kebijakan tersebut akan menimbulkan reaksi mekanisme pertahanan diri masyarakat, investasi di sektor pangan dilakukan kendati dengan tidak mengabaikan prinsip ekonomi, namun lebih menonjolkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan nasional seperti ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan penduduk serta kemakmuran petani. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada daerah-daerah tertentu seperti di pusat pemerintahan, tetapi dilakukan untuk seluruh penjuru wilayah Indonesia. Dalam aturan pelaksanaan tidak membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, tetapi dalam kenyataan kebijakan pertanian diprioritaskan daerah pulau Jawa karena sebagian besar pertanian bahan pangan beras terdapat di daerah ini, sedangkan di luar pulau Jawa kurang banyak mendapat perhatian disebabkan daerahnya masih berupa hutan yang lebat dan kurang didukung sumber daya lainnya.

Pelaksanaan bantuan pemerintah sebagai usaha pembangunan pedesaan seperti *Program Bantdes* yang dilakukan pemerintah pusat merupakan keputusan bersama Mendagri, Menkeu dan Menneq Ekuin/Ketua Bappenas No. 67 tahun 1975 Nomer Keputusan 402/MK/I/4/1975 dan 031/Kep/4/1975, tanggal 24 April 1975. Program bantuan pembangunan desa dilaksanakan sejak tahun anggaran 1969/1970 semula dikenal dengan nama *subsidi desa*. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat merupakan bentuk upaya timbal balik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penarikan wajib pajak dari penduduk di daerah-daerah. Disamping itu adanya perusahaan daripada hasil pembangunan dari usaha pemberdayaan sumber daya alam dan usaha badan milik negara dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Anggaran pembangunan sektor pertanian dan pengairan selama Pelita I sejumlah 212 milyar rupiah.<sup>2</sup> Mulai tahun 1960 pemerintah pusat secara berkala memberikan bantuan berupa uang Rp 100.000,- pada setiap desa atau kampung di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia. Pemerintahan desa oleh para pejabatnya yaitu pamong desa menggunakan dana bantuan tersebut sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan penduduknya. Salah satu tujuan dan usaha pembangunan desa yaitu dengan peningkatkan produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan usaha maksimal agar menunjukkan hasil pertumbuhan ekonomi yang baik. Oleh sebab itu besarnya bantuan untuk tiap desa di seluruh wilayah Indonesia ditingkatkan dari repelita ke repelita selanjutnya. Untuk lebih mengetahui kenaikan bantuan pemerintah pada desa untuk melaksanakan pembangunan di pedesaan lihat tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Bantuan dan Realisasi Bantuan Desa Di Seluruh Indonesia**

Tahun	Jumlah Bantuan (Rp) tiap tahun	Realisasi seluruh penggunaan dana dalam satu pelita (Rp juta)
Awal Pelita I 1969/74	100.000,-	2.684,00
Awal Pelita II 1974/79	200.000,-	11.400,00
Awal Pelita III 1979/84	450.000,-	31.025,00
Awal Pelita IV 1984/89	1.250.000,-	92.882,00
Tahun 1985/86	1.350.000,-	98.568,00

Sumber: Pidato Kenegaraan RI didepan Sidang DPR 1985 beberapa edisi.

---

<sup>2</sup> A.T. Birowo (Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian), *Memanfaatan Telur Emas Desa*. Prisma No. III April 1976, hal 47.

Berdasarkan tabel di atas, pemberian bantuan desa yang diberikan secara bertahap dalam setahun. Pemberian dana *bandes* tiap tahun dalam satu repelita dibuat dan disetujui dalam perencanaan anggaran perbelanjaan negara (APBN) selalu ditingkatkan, disesuaikan dengan keadaan keuangan dan perkembangan perekonomian negara. Disamping bantuan tersebut diberikan secara tetap dan rutin tiap tahunnya, juga diberikan dana bantuan lain diluar *bandes* bagi desa/kelurahan yang sedang melaksanakan suatu proyek pembangunan desa dengan mendapat persetujuan dari pejabat pemerintah di atasnya (camat, bupati, dan Gubernur) dalam satu wilayah propinsi yang diajukan dengan menggunakan proposal kegiatan pembangunan. Secara realisasi pemakaian dana yang telah digunakan dan disediakan pemerintah seperti terlihat dalam tabel diatas yang diberikan setiap tahun per-pelita digunakan untuk pembangunan desa diberikan secara keseluruhan daripada wilayah Indonesia dalam satu program repetita, juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dalam kenyataannya bantuan tersebut tidak dapat mencukupi semua anggaran yang diperlukan dalam pembanguan desa di seluruh wilayah Indonesia, tetapi bantuan tersebut terutama berguna untuk mengurangi beban pengeluaran keuangan dan anggaran perbelanjaan pemerintah desa, selain itu juga berfungsi sebagai sarana pemacu keluarnya dana swadaya dari masyarakat sediri. Dalam hal ini pajabat pemerintahan desa dan bentuk hubungan pelaksanaannya seperti Lembaga Musayawarah Desa (LMD), Lembaga Sosial Desa (LSD) diharuskan mampu mewujudkan rencana tersebut.

Pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah pusat, dalam kenyataannya tak dapat dipungkiri, bagaimanapun juga pola pembangunan desa masih tergantung kepada peran pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sehingga keberhasilan pembangunan desa berhubungan erat dengan struktur pemerintahan pusat dan desa. Campur tangan pemerintah kedalam tubuh masyarakat desa setidaknya tercermin dari subsidi yang diberikan pemerintah pusat pada desa-desa di seluruh Indonesia. Dari data bulan Juli 1975 memperlihatkan campur tangan pemerintah dalam pengaruh dari peranan pemerintah dalam pembangunan desa terhadap para pejabatnya. Diantara campur tangan pemerintah yaitu; memberi subsidi kepada kepala desa sebesar Rp 200.000,- sebagai perangsang baginya untuk mau dan berusaha membangkitkan tingkat swadaya masyarakat di wilayahnya, subsidi untuk pemerintah Dati II atau Bupati sebesar Rp 300,- per-penduduk dan supaya melakukan proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja dengan biaya Rp 150,- hingga Rp 200,- per orang per hari, selain itu juga memberikan bantuan dana pada badan atau lembaga perekonomian yang bersifat kerakyatan dan sederhana seperti koperasi untuk mengairahkan anggota koperasi termasuk memberikan kredit pada golongan usaha ekonomi lemah dan sebagainya.<sup>3</sup> Salah satu bentuk dari bantuan yang diberikan oleh Bupati Dati II Klaten dalam proyek padat karya yaitu pemberian dana bantuan kepada Desa Jetis sebesar 5 juta rupiah digunakan untuk membangun saluran irigasi. Bantuan tersebut diberikan pada tahun 1977 kepada

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bp Sudarsono, pegawai Kecamatan Delanggu, tanggal 21 Agustus 2002.



Kepala Desa Jetis bersama perwakilan sebagai saksi dari pihak Kecamatan Delanggu yaitu camat di *pendapa kabupaten* bersama-sama dengan daerah lainnya. Dana tersebut digunakan untuk *bendung kali* atau membuat tanggul pada sungai agar air dapat terkumpul kemudian dapat dialirkan kelahan persawahan, selain itu juga untuk membuat *loning* atau saluran irigasi permanen sepanjang 70 meter. Dana tersebut tidak dapat mencukupi dari semua proyek tersebut, untuk itu para petani pada lingkup lahan sekitar proyek dipungut iuran sebesar Rp 10.000,- agar proyek dapat selesai dan berguna serta tidak berhenti ditengah jalan.<sup>4</sup>

Di negara Indonesia sebagian besar para pejabat pemerintah desa sebagai pemimpin formal desa mengikuti garis petunjuk dan aturan dari pemerintah dalam hal pelaksanaan pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Hal tersebut tidak lepas dari faktor kepemimpinan, baik kepemimpinan dari tingkat atas maupun bawah, dalam arti bagaimana seseorang pemimpin dapat menyelami secara psikologis masyarakat yang dipimpinnya dan selanjutnya mengkoordinasi mereka agar mampu bergerak secara rasional untuk mengembangkan daerahnya.

Kebijakan pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai perincian oleh pemerintah pusat mengenai ketentuan dan peraturan yang harus ditaati dalam penyelenggaraannya. Dalam hal ini pemerintah menentukan bentuk hubungan dengan badan atau lembaga lainya yang terkait dengan pembangunan di bidang pertanian tersebut. Tidak semua aspek dari hubungan tersebut dapat diawasi, diatur dan diwajibkan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, pada umumnya terdapat pengaruh cukup kuat dari pemerintah pusat terhadap ketentuan dan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bp Ratmo Panitro, op cit.

program yang dilaksanakan. Contoh yang jelas terwujud ialah dalam kebijaksanaan bagi hasil, hak dan kewenangan atas sumber daya alam, tanah dan air, pemberian kredit melalui badan resmi seperti BRI, pegadaian dan sebagainya. Dalam hal pembagian hasil pendapatan daerah berupa pajak yang diperoleh dari penarikan wajib pajak yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan desa, yaitu *bekel* (dulu masa kolonial sampai sekitar kemerdekaan), Kepala Dusun (sekarang) ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemberian kredit dari badan keuangan negara seperti BRI dan Koperasi untuk masyarakat yang mengajukan kredit harus mendapat rujukan dan hak persetujuan penanggungan dari pejabat desa.

Dari contoh di atas menggambarkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan diberbagai bentuk kebijakan yang dilakukan walaupun tidak secara langsung dapat mengawasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Misalnya dalam bentuk sistem dan cara pelaksanaan dalam rangka mengadakan hubungan terhadap masyarakatnya, pembagian hasil yang diperoleh dari pertumbuhan pendapatan daerah. Dimana para pejabat pemerintahan tersebut harus melaporkan perkembangan dari kebijakan yang diterapkan di wilayah kewenangannya dengan menyetorkan atau memberikan sebagian dari pendapatan kepada pemerintah pusat sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sesuai undang-undang yang berlaku. Pengelolaan daerah terhadap hak dan kewenangan atas sumber daya alam, tanah dan air mendapat berbagai petunjuk dari pemerintah pusat, seperti yang tertera dalam undang-undang pokok agraria. Disamping itu di bidang keuangan seperti perkreditan juga mendapat pengaruh kuat pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah pusat menyediakan

dana untuk dipinjamkan kepada pelaku pertanian untuk meningkatkan hasil. Perkreditan diberikan melalui badan atau lembaga keuangan yang telah dibentuk pemerintah, diantaranya BRI, koperasi-koperasi dan pegadaian serta badan usaha milik negara lainnya dengan bunga lunak dan pengembaliannya dalam jangka waktu lebih lama, sehingga tidak akan memberatkan masyarakat pedesaan terutama petani.

Menurut keterangan informan Soemarno M.P, dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan desa terutama di bidang pertanian, pamong desa diharapkan dapat berperan sebagai pelaku yang dapat memotivasi, sebagai inovator dan dapat memfasilitasi untuk menggalang kebersamaan diantara penduduk dalam mengelola sumber daya alam dan manusia serta dana daripada masyarakat di wilayahnya. Pamong desa tidak diberi gaji dalam bentuk uang sebagai imbalan kerja, melainkan diberikan gaji berupa *tanah bengkok* atau *tanah lungguh* desa. Luas tanah tersebut sebagai gaji disesuaikan dengan posisi hierarkinya dalam pemerintahan desa dalam ukuran *bau* (satu *bau*=7049 m<sup>2</sup>). Kepala desa mendapat gaji berupa lahan sawah sebesar 5 *bau*, sekretaris desa 3 (tiga) *bau*, kepala urusan sebesar 2 (dua) *bau*, kepala dusun 1 (satu) *bau*. Tanah lungguh dimana secara sosial ekonomis merupakan keeklusifan penghasilan dari pejabat pemerintahan desa, juga dapat menaikkan status dan posisi seseorang dalam masyarakat desa. Dalam posisi hierarki pemerintahan desa, kepala desa dan juru tulis/sekretaris atau carik memegang peranan penting, terutama dalam kewenangan di bidang administrasi dan besarnya gaji, sehingga sering merupakan pokok dalam perebutan kekuasaan dan kewenangan desa. Disamping itu,

perangkat desa lainnya juga menjadi perebutan untuk menduduki jabatan, tetapi tidak sebesar perebutan untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa dan sekretaris desa (carik).<sup>5</sup>

Pada awal dasa warsa tahun 1970, nampak munculnya kehendak pemerintah untuk tidak saja mengatur, melainkan juga ingin mendayagunakan lembaga-lembaga di desa. Salah satu pemberdayaan yaitu pembentukan lembaga koperasi, dimana pemerintah pusat telah menciptakan undang-undang No 79 tahun 1958 dan diikuti pembentukan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 1960 dan kemudian Intruksi Presiden No 2 tahun 1960, tentang Badan Penggerak Koperasi untuk mengatur dan menata perekonomian. Dengan adanya pertemuan antara kalangan lembaga koperasi, pemerintah pusat dan cendekiawan telah menghasilkan suatu rumusan sendi-dasar kehidupan koperasi. Dengan hal tersebut, pemerintah pusat telah menempatkan diri untuk ikut campur dalam proses pembangunan desa dengan bentuk membangun koperasi dan melakukan intervensi dalam perkembangan koperasi. Salah satu bentuknya yaitu pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) untuk mempermudah memenuhi kebutuhan dari masyarakat petani dalam pengolahan lahan sawah dan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok hidup yaitu pangan dan keuangan. Pada umumnya para petani di pedesaan tidak memiliki modal yang cukup untuk mencukupi semua sarana dan prasarana untuk mengelola lahan pertanian mereka. Maka dari itu pemerintah membantu petani memperoleh modal untuk mengolah lahan pertanian mereka. Untuk itu pemerintah memberikan pinjaman modal yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Soemarno M.P, *op cit*.

diterapkan dengan sistem perkreditan dengan bunga lunak, melalui lembaga yang dibentuk pemerintah seperti KUD, BUUD, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan sebagainya. Sistem perkreditan dilakukan melalui badan kredit resmi dan setengah resmi pemerintah. Badan kredit resmi seperti pegadaian dan Bank Rakyat Indonesia, sedangkan badan kredit setengah resmi seperti bank-bank desa dan lumbung desa serta adanya bantuan-bantuan dari lembaga swadaya masyarakat sendiri.

Peranan lembaga tersebut di atas juga memiliki peranan cukup besar besar dibidang pertanian, yaitu terutama dalam bidang keuangan dan saluran distribusi barang-barang pertanian. KUD merupakan badan koperasi yang dibentuk, beranggotakan petani dan ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran petani. Hal tersebut terlihat dari jumlah dari anggota tetap maupun tidak tetap, anggota tetap KUD Unit I bertempat di wilayah Desa Bowan lebih besar dibanding KUD Unit II bertempat di wilayah Desa Gatak. KUD Delanggu Unit I lebih besar anggota, karena luas wilayah persawahan dan pelaku pertanian padi di wilayah selatan lebih besar. Daerah Pembinaan (dabin) dari KUD Delanggu Unit I meliputi Dukuh, Jetis, Bowan, Butuhan, Banaran, Sribit, Karang, Mendak dan Krecek, memiliki luas lahan persawahan lebih besar dibanding daerah binaan KUD Delanggu Unit II yang berada di sebelah utara yang sebagian besar merupakan daerah huni seperti di perkotaan.

Anggota-anggota tetap KUD tersebut aktif dalam mengadakan hubungan dengan KUD, dimana petani dapat meminjam modal dan menggunakan sarana penunjang pertanian seperti pupuk, bibit padi, pestisida dengan cara kredit. Selain

itu disarankan untuk menjual hasil panen kepada KUD. Pihak administrasi dan pengurus KUD akan membeli gabah maupun beras dengan harga cukup tinggi menurut standar dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil pembelian dari petani kemudian didistribusikan kepada Bulog terdekat. Penjualan hasil panen berupa gabah maupun beras pada KUD yang dilakukan secara rutin oleh petani anggota tetap dapat juga digunakan sebagai *agunan* untuk memperoleh kredit dari KUD. Tetapi hal tersebut harus mendapat persetujuan dan pertanggungjawaban dari pihak resmi desa yaitu pejabat Pamong Desa terutama dari Kepala Desa.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil sensus pertanian yang diselenggarakan pada tahun 1973, di Kabupaten Klaten sudah terdapat 76 koperasi pertanian, 108 koperasi simpan pinjam, 74 BUUD dan 526 badan perkreditan desa yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Disamping itu juga terdapat koperasi yang bergerak di bidang konsumsi sebanyak 137 buah dan satu buah koperasi kerajinan di Kecamatan Juwiring.<sup>7</sup> Keberadaan badan perkreditan tersebut sangat membantu para petani untuk mendapatkan modal guna keperluan pertanian, seperti untuk membeli pupuk dan bibit padi yang harganya cukup mahal. Dimana petani dapat memperoleh modal awal untuk mengolah lahan pertanian dengan cara kredit dan untuk mengembalikan pinjaman dengan cara *mengangsur* dalam

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bp Hudi Mustofa, tanggal 4 Mei 2002, hal ini juga dibenarkan oleh informan lain.

<sup>7</sup> Bappeda Klaten, *Statistik Kabupaten Klaten Tahun 1973*. Klaten: K.S.S, 1974, hal 29.

waktu yang cukup lama, karena petani biasanya mengembalikan pinjaman setelah panen.<sup>8</sup>

Disamping memberikan kredit kepada petani, sejak tahun 1973, peranan KUD di setiap kecamatan agar melibatkan secara langsung dalam pembelian padi atau beras sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh BULOG berikut persyaratan kualitasnya. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghindari penjualan hasil pertanian pada tengkulak-tengkulak, yang banyak merugikan petani. Pemerintah melakukan kebijakan harga dasar yaitu menetapkan harga maksimum dan minimum bagi beras yang mulai berlaku akhir tahun 1969. Pemerintah membeli dengan harga tinggi terhadap gabah hasil panen langsung dari petani dibanding pembelian oleh para tengkulak. Dalam hal ini pemerintah mempunyai tujuan merangsang peningkatan produksi padi. Selain itu tujuan utama dari penetapan harga dasar gabah dan beras tersebut adalah untuk menjaga agar harga beras di pasaran dalam keadaan stabil, menguntungkan pendapatan petani dan harganya merata serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari beberapa peranan pemerintah tersebut di atas, merupakan salah satu langkah legitimasi pada pemerintah desa terutama petani pada khususnya dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Pemerintah pusat dalam memberikan berbagai bentuk kewenangan tersebut bersifat *top down* artinya perintah diberikan dari tingkat lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah, dimana pemerintah pusat sebagai pangkal terwujudnya kebijakan tersebut. Pada kurun waktu tahun

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hudi Mustofa, mantan Pamong Tani Desa Jetis, tanggal 10 September 2002.

1970 sampai 1980-an hampir semua kebijakan pembangunan desa dibuat dan dilaksanakan menurut aturan-aturan dari pusat, sesuai dengan asas pemerintahan yang berlaku yaitu asas desentralisasi.

## **B. Ikatan Sosial Pamong Desa dengan Masyarakat Di Bidang Pertanian**

Pada prinsipnya kehidupan masyarakat pedesaan di Kecamatan Delanggu menggunakan pola kepemimpinan dengan ikatan hubungan yang berdasarkan pada istilah daripada konsep tradisional. Konsep tersebut diantaranya adalah konsep yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dalam mengadakan hubungan atau interaksi antara masyarakat dengan pemimpinnya yaitu pamong desa di bidang pertanian padi di Kecamatan Delanggu juga terdapat prinsip hubungan masyarakat yang bersifat saling melindungi dan membutuhkan yaitu hubungan *patron and client* atau *majikan dan buruh*.

*Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mbangun Karsa* dan *Tut Wuri Handayani* merupakan bentuk hubungan pamong desa dengan masyarakat desa sebagai bentuk interaksi yang ada dan diterapkan di dalam proses perkembangan di bidang pertanian. Dalam pengamalan dari bentuk hubungan tersebut, dimana kepala desa beserta pamongnya merupakan *bopo babuning rakyat*, artinya bahwa pamong desa dalam melakukan interaksi terhadap rakyat diharapkan untuk ikut serta dalam kehidupan masyarakat baik dalam penderitaan maupun kegembiraan. Pamong desa merupakan sebagai *bopo* atau ayah sebagai pemimpin bertanggung jawab penuh dan bersedia melayani dan melakukan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Jadi pamong desa mempunyai fungsi memimpin seperti dalam



kehidupan sebuah rumah tangga. Sedangkan dalam bahasa Jawa *bopo momong anak* artinya mereka mengasuh dan melindungi rakyat seperti melindungi dan mengatur keluarganya. Untuk lebih mendalami mengenai hubungan antara pamong dengan masyarakat petani dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Hubungan antara pamong desa dengan masyarakat pedesaan sesuai dengan istilah *patron and client* atau hubungan *majikan dan buruh* sebagian telah dijelaskan di bab depan. Masyarakat pedesaan di daerah Kecamatan Delanggu dimana penduduknya sebagian besar kehidupannya sebagai petani tidak banyak berspekulasi mengenai kehidupan, mereka seringkali menganggap hidup adalah kepasrahan terhadap nasib pemberian dari Tuhan, artinya hidup merupakan serangkaian penderitaan dan nasib yang harus dijalannya. Hal itu dapat menentukan sikap hidup dan perilaku masyarakat pedesaan terutama petani. Mereka menganggap eksistensinya merupakan partikel kecil yang tidak berarti, mengapung mengikuti pasang surutnya alam, tergantung pada kepemimpinan terutama dari pejabat administrasi pemerintah atau pegawai negeri dari kota yang memiliki kekuasaan dan kewenangan di berbagai kebijakan pemerintahan.<sup>9</sup> Hal menjadikan masyarakat petani berada di bawah keberadaan para pengemuka desa, seperti para pamong desa, petani kaya dan pemilik modal. Hal tersebut menggambarkan bahwa petani dan buruh tani serta petani yang kurang pengalaman dan modal dibawah kekuasaan *tokoh elit desa*. Keberadaan tersebut

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Masyarakat Pedesaan Di Indonesia, masalah pembangunan bunga rampai antropologi terapan*. Jakarta: LP3ES, 1982, hal 105.

mengambarkan petani merupakan masyarakat yang sering mendapat tekanan dalam hubungan *patron and client* di bidang pertanian.

Pamong desa dalam berhubungan menggunakan pendekatan-pendekatan khusus pada masyarakat, terutama guna mengetahui secara psikologis bagaimana masyarakat petani dalam menerima suatu kebijakan di bidang pertanian. Selanjutnya mengusahakan bagaimana menggerakkan masyarakat petani agar mereka mau dan bersedia menjalankan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintahan desa dan pusat. Pamong desa memiliki kedudukan, status lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Hal itu merupakan salah bentuk perbedaan tingkatan hidup dalam keberadaannya di dalam masyarakat desa. Pamong desa sering disebut sebagai eksekutif kecil di daerah sebagai pelaksana pemerintahan yang paling rendah. Semua aturan pelaksanaan, instruksi pemerintah mengalir dan memusat di tangan pamong desa, sedangkan yang berfungsi sebagai koordinator utama adalah kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kepala desa beserta pamong desa lainnya, sering disebut sebagai *patron* atau majikan juga tokoh utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di pedesaan. Maksudnya adalah dalam melaksanakan suatu kegiatan pamong desa merupakan inti dari pelaksanaan program di daerahnya. Sedangkan rakyat atau bawahan harus bersedia menjadi pihak yang menjadi beban atau dari pelaksanaan kebijakan diberbagai bidang. Dalam bidang pertanianpun pamong desa harus dapat menjadi tokoh utamanya. Misalnya dalam penggunaan bibit padi jenis baru yang dianjurkan pemerintah untuk ditanam pada lahan-lahan persawahan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi beras

nasional, sehingga tercapai swasembada pangan dan peningkatan kemakmuran petani. Pamong desa sebagai tokoh terkemuka yang memiliki kelebihan dibanding masyarakat dalam wilayahnya, diharapkan berfungsi sebagai *agent of change* atau tokoh yang dapat mempengaruhi sikap dalam melakukan perubahan daripada masyarakat tradisional pedesaan. Meningkatnya produksi pertanian padi menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan para petani, sistem bagi hasil dalam penyakapan sawah, sikap dan perilaku masyarakat desa yaitu terjadi pergeseran dari pertanian yang bersifat subsisten kepada pertanian rasional disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Di desa Delanggu pada tahun 1968 sebagai petani dan buruh tani, Bp Soekiman mendapat upah sebesar Rp 6500,- dan isterinya sebesar Rp 4500,- sebagai *buruh matun* ditambah dengan kiriman makan dua kali. Pada tahun 1980-an upah tersebut naik menjadi Rp 8500,- dan Rp 6000,-. Peningkatan upah juga terjadi pada pelaku pertanian sawah lainnya seperti membajak sawah atau *megawe*, persewaan traktor dan sebagainya.<sup>10</sup>

Sementara itu bagi pemilik tanah persawahan, kenaikan produksi padi jelas membawa dampak positif. Pendapatan mereka bertambah besar, tahun 1968 rata-rata produksi padi sawah adalah 47,32 kuintal perhektar tahun 1980 meningkat menjadi 54,90 kuintal perhektar. Jadi rata-rata produksi padi meningkat sebesar 7,58 kuintal perhektar. Jika harga gabah pada saat itu Rp 130,- perkilogram, maka pendapatan petani mengalami peningkatan sebesar Rp 54.000 per hektar. Namun demikian mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli bibit jenis baru dengan kualitas tinggi yang di keluarkan oleh

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan BP Soekiman, *Op cit.*

badan resmi pemerintah seperti KUD, pupuk dan obat pembasmi hama. Perubahan tersebut memicu pelaku pertanian untuk lebih giat lagi dalam mengolah lahan sawah sehingga mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya

Hubungan masyarakat antara pamong desa dengan petani menurut yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro dapat dijelaskan menurut tingkatan sesuai dengan urutan arti dari kata-kata dalam kalimat dan berdasarkan keberadaanya. Urutan berdasarkan keberadaan dalam masyarakat pedesaan di daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Pertama hubungan *Ing Ngarso Sung Tuladho*. Istilah *Ing Ngarso Sung Tulodho* berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu berada di lapisan depan untuk memberi pola panutan atau contoh teladan daripada orang-orang atau masyarakat dalam mempelopori dari suatu tindakan daripada masyarakat yang dipimpinnya, melalui sikap, tingkah laku dan perbuatannya atau tindakanya. Pengamalan hubungan tersebut telah ada dan berlaku di dalam kalangan masyarakat pedesaan Indonesia terutama dalam masyarakat pedesaan Jawa pada umumnya,<sup>11</sup> serta khususnya di daerah penelitian

Dalam hal ini ikatan dalam hubungan daripada peranan dari pamong desa dengan masyarakat pedesaan terutama para petani sawah basah seperti yang terdapat pada masyarakat daerah Kecamatan Delanggu merupakan ikatan kepemimpinan yang memiliki hubungan sangat erat dengan petani, dimana masyarakat tradisonal desa tergantung pada pemimpinnya seperti dalam istilah

---

<sup>11</sup> Onong Uchgane Effendi, *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: Alumni, 1981, hal 15-17.

*patron and client*. Pamong desa memiliki status yang cukup tinggi dibanding dengan masyarakat pada umumnya, keberadaan mereka mirip yang terdapat dalam suatu perusahaan yaitu adanya majikan dan buruh. Keradaan mereka merupakan pemberian nasib istimewa yang diberikan dari Tuhan dengan terlihat melalui munculnya *pulung* sewaktu akan dilakukan pemilihan kepala desa. Fungsi kepemimpinan pamong desa di sini adalah pemimpin yang berperan sebagai *agent of change* dalam masyarakat pedesaan. Mereka dipercaya dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan di desa tersebut.<sup>12</sup> Patron atau majikan adalah orang yang memiliki kelebihan, seperti kekayaan harta benda, perusahaan atau badan produksi yang dianggap dapat mempelopori jalan untuk meninggalkan masa lampau menuju zaman yang lebih maju yaitu menetapkan kaidah sistem sosial yang baru atau yang diperbarui dan diikuti oleh anggota masyarakat berdasarkan otoritas pimpinan yang diakui oleh masyarakat di wilayahnya.<sup>13</sup> Dalam hal ini pamong desa-lah yang mempunyai hak dan wewenang memberikan suatu himbauan atau perintah kepada rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya. Sedangkan petani sebagai *client* atau buruh, melayani para majikan atau para pengemuka desa desa dengan memberikan berbagai pengabdian secara sukarela. Kalangan masyarakat desa, dimana lurah desa dan stafnya mampu memainkan peranan sebagai *bapak* atau majikan yang harus mampu memberikan hal terbaik pada keluarganya serta dalam memimpin dan mengatur bawahannya, sehingga

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bp.Walidi, Kaur Keagamaan Desa Banaran, tanggal 20 Agustus 2002.

<sup>13</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*. Yogyakarta: UGM Press, 1991, hal 301.

masyarakat dapat menerima peranan mereka dengan perasaan senang walaupun juga timbul perasaan sedikit keterpaksaan dalam istilah jawa adanya *ewuh perkewuh*<sup>14</sup> terhadap tokoh-tokoh yang dihormati dan disegani oleh masyarakat.

Masyarakat dalam menerima peranan mereka seakan merupakan suatu keharusan seperti yang diterapkan dalam kerajaan bahwa *abdi* atau rakyat harus tunduk dan melayani pemimpin atau rajanya walaupun perintah tersebut tidak sesuai dengan hati atau keinginan mereka. Dalam proyek pertanian *tani makmur* pamong desa merupakan pelopor yaitu sebagai *suritauladan* bagi rakyatnya. Maksudnya adalah pamong desa sebagai orang pertama yang harus menerima dan melaksanakan kebijakan yang diberikan dari perangkat pemerintah di atasnya. Kebijakan itu berupa himbauan dari pejabat kabupaten, kecamatan secara resmi maupun tidak resmi. Himbauan secara resmi dengan adanya surat instruksi bupati yang diberikan pada pejabat desa lewat surat edaran. Selain itu bilamana pejabat pemerintah di atasnya sedang melakukan *kunjungan* atau *lawatan* pada daerah tertentu. Isi dari himbauan dalam hal ini ialah pamong desa harus bersedia memberikan lahan sebagai lahan percontohan penggunaan bibit baru seperti PB 5 dan PB 8 sebelum diperuntukkan dan digunakan pada lahan petani.

Kedua hubungan Ing Madya Mbangun Karso. Istilah *ing madya mbangun karso* yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mau dan mampu bersama-sama masyarakat melakukan program yang direncanakan, selain itu juga merupakan penggerak dan memberikan semangat kepada bawahannya. Dalam hal

---

<sup>14</sup> *Ewuh pakewuh* yaitu perasaan tidak enak atau sungkan untuk menolak sesuatu yang diperintahkan oleh atasan yang mereka hormati.

ini pamong desa harus terjun bersama petani turun kelapangan atau lahan persawahan tanpa ada rasa *kabotan*<sup>15</sup> sehingga masyarakat petani dapat leluasa untuk bertanya dan mengadakan saling tukar pikiran dan pengalaman. Pamong desa bersedia meninjau lahan sawah, sehingga dapat mengetahui dan membantu dari kekurangan dan kesulitan yang dialami petani. Jadi pamong desa tidak hanya bekerja di kantor saja, juga harus dilapangan bersama penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan di desanya.

Hal ini memberikan gambaran bahwa pamong desa memiliki rasa kebersamaan dengan petani, jadi petani tidak merasa dibedakan dalam kedudukan dalam pelaksanaan pertanian sawah.

Ketiga hubungan *Tut Wuri Hubungan Handayani*. Istilah *tut wuri handayani* berarti bahwa seorang pemimpin merupakan bagian dari masyarakat sewajarnya yang mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini para pamong desa tidak selalu mendapatkan posisi yang paling tinggi di bidang pertanian dalam masyarakat pedesaan. Artinya bahwa setiap pejabat atau pamong desa tidak pasti selalu benar, serta pandai atau ahli di bidang pertanian. Petani dalam pengalamannya bahkan lebih banyak memiliki pengalaman kerana sebagian besar waktu dan tenaga mereka gunakan untuk melakukan kegiatan pertanian menanam padi, juga oleh karena bakat keturunan sejak dulu.

Dalam hal ini pamong desa memberikan dorongan serta dukungan pada petani dalam melaksanakan program. Dorongan tersebut berupa pikiran dan

---

<sup>15</sup> *Kabotan* artinya bahwa seseorang mempunyai rasa keberatan, malas, sungkan atau gengsi melakukan sesuatu pekerjaan yang dimungkinkan karena kedudukan atau status diri mereka

semangat bekerja petani, sehingga petani merasa bahwa program tani makmur merupakan hasil gagasan dan pemikiran dari berbagai pihak terkait tidak hanya keputusan dari pemerintah pusat saja bahkan juga dari para wakil rakyat yang dipilih masyarakat desa secara demokratis dan langsung untuk menduduki dalam kursi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Pada pelaksanaan program tani makmur di daerah Kecamatan Delanggu terdapat beberapa dari pejabat desa memberikan sebagian hasil dari panen mereka dengan gratis kepada petani yang bersedia untuk menggunakan sebagai bibit persemaian. Bahkan petani juga mendapat bantuan dana dalam membuat persemaian, jika dilakukan secara berkelompok oleh kelompok tani, sehingga penanaman dengan jenis yang sama dalam wilayah sama akan meningkatkan hasil, karena dalam proses penyerbukan atau pembuahan padi akan lebih sempurna daripada dilakukan secara terpisah-pisah.<sup>16</sup> Hal tersebut dilakukan karena petani sulit mendapatkan bibit padi jenis baru tersebut, serta karena mahalnnya harga bibit yang dijual oleh toko-toko pertanian. Selain itu bibit padi yang biasanya dibeli oleh para petani di KUD atas anjuran pamong desa lebih murah daripada membeli di toko pertanian maupun pengecer bibit. Harga satu kilogram Cisedane Rp 250,-, bibit IR atau PB seharga 240 rupiah, rojolele Rp 275 dan bengawan Rp 230,- lebih murah sekitar sepuluh persen.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bp. Soepandi, eks penyalur benih resmi di wilayah Delanggu dari Dinas Pertanian Klaten, tanggal 18 Mei 2002.

<sup>17</sup> *Ibid*, tanggal 23 Agustus 2002.



### C. Tanggapan Petani terhadap Proyek Tani Makmur

Masyarakat pedesaan terdiri dari ragam sifat dan bentuk masyarakat memiliki nilai dan keberadaan tersendiri. Dalam hal ini, penduduk di Kabupaten Klaten khususnya masyarakat pedesaan di Kecamatan Delanggu memiliki sifat dan sikap tersendiri. Sifat dan sikap tersebut terjadi karena keberadaan letak dan bentuk dari geografis yang menguntungkan. Keadaan yang menguntungkan tersebut dapat mempengaruhi sifat dan sikap petani, seperti muncul sikap *narimo*, sehingga kurang dapat mengantisipasi perkembangan pertanian secara cepat. Keberadaan menguntungkan tersebut yaitu wilayah Kecamatan Delanggu merupakan wilayah yang sangat subur dengan melimpahnya pengairan berasal dari mata air alami Cokro, serta terdapatnya sosial budaya tradisional dan modern. Sosial budaya tradisional tersebut yaitu memiliki adat istiadat atau budaya lama akibat adanya pengaruh dari budaya Kraton Surakarta dan Yogyakarta sejak dahulu.

Sosial budaya tradisional dalam hal ini adalah kebudayaan adat atau tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat pedesaan berhubungan dengan pelaksanaan pertanian sawah basah yang masih bersifat kuno. Tradisi tersebut telah ada sejak dahulu kala atau dari nenek moyang, cikal bakal, seperti halnya tradisi yang dilakukan para pejabat dari birokrasi kraton yang ada di daerah pedesaan seperti wedana, demang, lurah desa, bekel dan keturunan kerabat dari kraton. Tradisi tradisional tersebut diantaranya; dalam menentukan jenis bibit padi yang akan ditanam seharusnya mendapat izin (*palillah*) dari para pembesar kraton, dalam menentukan saat-saat yang tepat dalam mengolah lahan serta untuk mulai

menanam bibit yang telah disemaikanpun melalui perhitungan waktu baik berdasarkan pada kitab primbon disesuaikan dengan *pranata mangsa*, bahkan saat panen-pun juga dicari *hari baik*, tidak sama atau berbenturan dengan hari kematian (*Geblag-ke*) anggota keluarga dan kerabat dekatnya.<sup>18</sup>

Adanya kebijakan di bidang pertanian dari pemerintah pusat dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan implementasi, kebijakan itu menimbulkan berbagai tanggapan atau respon dari masyarakat. Bentuk dari tanggapan tersebut diantaranya yaitu tanggapan yang bersifat positif dan negatif. Tanggapan bersifat positif adalah tanggapan dalam bentuk penerimaan dan dukungan suatu rencana kebijakan yang akan diterapkan pada diri mereka. Sedangkan tanggapan bersifat negatif yaitu adanya respon menolak, tidak menggunakan dan menentang bahkan menghambat dan mempersulit berjalannya suatu rencana program yang diterapkan pada mereka. Untuk itu diperlukan suatu kemampuan dari para pelaku dan pembuat kebijakan, serta dalam hal penyampaian atau penyaluran dari kebijakan di bidang pertanian tersebut. Reaksi petani dalam penggunaan jenis-jenis bibit padi yang dianjurkan oleh pemerintah melalui badan resmi maupun setengah resmi adalah sebagai berikut :

1. Sikap positif petani dalam penggunaan bibit padi jenis baru.

Masyarakat pedesaan di Kecamatan Delanggu, sebagian besar petani dalam menanggapi adanya kebijakan pemerintah di bidang pertanian dalam penggunaan bibit padi, mempunyai *sikap setuju menerima dan senang* bilamana

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bp Harso Suwito, tanggal 4 Mei 2002.

terjadi suatu perubahan dalam penggunaan bibit padi, yang berbeda dengan yang mereka gunakan sebelum adanya kebijakan dan anjuran dari pemerintah. Hal ini mereka menganggap bahwa suatu yang baru berasal dari luar daerah akan selalu menghasilkan panen yang banyak dan memiliki kualitas yang lebih baik. Sikap ini terdapat biasanya terdapat pada kelompok petani yang ingin selalu memperoleh hasil tinggi produksi padi mereka, sehingga dengan produktifitas tinggi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup petani. Dalam hal ini petani yang sebelumnya merupakan *subsisten farm* sekarang mulai berubah menjadi petani pengusaha atau *farm peasant*. Mereka mempunyai pemikiran dan pendapat bahwa pemerintah tidak akan memberatkan atau merugikan para petani, tetapi berusaha meningkatkan tingkat kehidupan petani.

Sikap-sikap petani tersebut merupakan pemikiran yang maju dengan tidak menyerah pada nasib. Mereka melakukannya dengan cara bertahap, dengan melihat hasil panen dari lahan percontohan yang dilakukan pada lahan percontohan. Perubahan sikap petani ini akibat adanya pengaruh yang dilakukan oleh para perangkat atau pamong desa dalam mengadakan sosialisasi program yang akan dilakukan di daerahnya. Jadi dalam hal ini pamong desa merupakan *agent of change* masyarakat petani. Artinya pemimpin desa mampu membawa bawahan, pengikut di wilayahnya dalam pengaruhnya.

## 2. Sikap negatif petani dalam penggunaan bibit baru.

Masyarakat pedesaan dalam menerima suatu kebijakan dari berbagai pihak tidak selalu menerima dengan senang walaupun kebijakan tersebut

secara teori memberi keuntungan besar bagi petani. Dalam hal ini petani tidak cukup memberi rangsangan kuat dalam penerimaan yang cepat terhadap kebijakan. Oleh karena para petani mempunyai sikap, hak dan kewenangan pribadi, sehingga petani merasa bebas untuk mengambil berbagai sikap dan keputusan sendiri. Adapun bentuk dan sikap petani yaitu dengan tidak mengindahkan anjuran-anjuran yang dilakukan oleh para pejabat desa maupun petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari dinas pertanian yang didatangkan dari Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Klaten untuk menanam padi jenis baru tersebut.

Bentuk dari protes masyarakat petani yaitu mereka tidak bersedia menggunakan bibit-bibit padi yang dianjurkan oleh pemerintah. Mereka atau petani beranggapan bahwa bibit padi jenis baru yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri misalnya bibit padi jenis IR 5 dan IR 8 yang kemudian diberi nama PB 5 dan PB 8 merupakan hasil penelitian yang dikembangkan di negara Filipina, dianggap tidak sesuai dengan akar *kebudayaan bertani*<sup>19</sup> yang telah ada sebelumnya. Hal ini terutama terlihat pada para petani kolot atau golongan tua dan pedagang eceran benih padi yang menganggap akan mengurangi penghasilan mereka. Selain itu terdapat beberapa orang membuat berbagai isu atau pengaruh buruk dalam masyarakat, untuk menekan perasaan agar mereka tidak bersedia dan menolak menggunakan bibit

---

<sup>19</sup> Kebudayaan bertani adalah budaya-budaya yang dilakukan oleh petani dalam mengolah lahan pertanian, misalnya dalam penggunaan waktu, cuaca dan musim yang tepat disesuaikan dengan sistem *pranoto mongso* serta menganggap dan menghormati bahwa padi merupakan penjelmaan dari *Dewi Sri*, agar memperoleh hasil maksimal dan diberkahi oleh yang *gawe urip* atau Tuhan YME.

tersebut secara kasar. Disamping itu menurut informan Ir Hadi Soetomo dan perangkat desa yaitu Hudi Mustofa terdapat berbagai peristiwa pengrusakan ; seperti pemberian minyak tanah dan *pembabatan* tumbuhan padi pada lahan persawahan yang digunakan sebagai lahan percontohan bukan dari milik para pengemuka desa. Mereka melakukan pengrusakan tanaman padi diluar lahan milik pamong desa dan pengemuka desa dengan cara diam-diam pada waktu malam hari. Hal tersebut dilakukan oleh karena mereka takut pada kekuasaan dan pengaruh kuat dalam masyarakat, yaitu bila ulah mereka diketahui dan tertangkap basah akan dihukum secara kejam, dikucilkan bahkan diusir dan tidak diakui lagi sebagai warga daripada desa tersebut<sup>20</sup>. Petani di daerah Kecamatan Delanggu tersebut terutama merupakan petani yang memiliki budaya tradisional menganggap bahwa bibit padi lokal atau jenis padi tradisional seperti rojolele, genderuwo atau pariwulu, bengawan dan sebagainya sebagai warisan leluhur. Dan bilamana meninggalkan akan mendapat suatu hambatan atau balak di suatu hari nanti. Selain itu juga golongan masyarakat yang menganggap berkedudukan lebih tinggi daripada masyarakat umumnya sebagai kaum keturunan bangsawan, tidak bersedia mengubah gaya hidup mewah dengan mengkonsumsi beras yang mereka anggap paling baik, enak, empuk dan wangi yang tidak ada yang menyamai rasanya. Mereka akan tetap selalu menggunakan benih padi jenis lokal atau tradisional pada lahan persawahan mereka.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ir Hadi Soetomo dan Bp Hudi Mustofa, Op Cit dan Bp Ir Hadi Soetomo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peranan pamong desa dalam proyek pertanian tani makmur di Kabupaten Klaten dengan mengambil sampel masyarakat pedesaan di Kecamatan Delanggu, khususnya terhadap penggunaan bibit padi unggul nasional yaitu PB 5 dan PB 8 yang dilakukan oleh petani. Pada kurun waktu Pelita I dan Pelita II hingga Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 1983/1984, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan pertanian di pedesaan melalui Departemen Pertanian, Dinas Pertanian, Instansi pemerintahan dan lembaga atau badan yang terkait dengan proyek pertanian tersebut.

Dalam hal ini pamong desa dianggap sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian tanaman pangan, karena mereka berhubungan langsung atau berinteraksi langsung dengan pelaku pertanian atau petani di daerah pedesaan. Selain itu juga karena adanya sifat kepemimpinan masyarakatnya yang masih bersifat sederhana. Selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata pejabat pemerintahan desa yang disebut pamong desa dengan kepala desa sebagai koordinator memiliki peranan yang cukup besar. Disamping itu karena peranan dari petugas khusus yang dibentuk oleh pemerintah pusat yaitu petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang mempunyai tugas

pokok menyampaikan penyuluhan di bidang pertanian. Dalam hal ini pamong desa sebagai pemimpin formal desa memiliki keberadaan, sifat, sikap dan perilaku yang sangat baik. Mereka mampu menempatkan posisi heirarkinya dalam berbagai tingkatan;

Tingakatan pertama, pamong desa berada pada tingkatan paling atas pada susunan pemerintah dan lapisan masyarakat desa. Mereka bertugas melaksanakan program dari kebijakan pemerintah diatasnya. Program pembangunan dari pemerintah pusat ditujukan untuk membangun desa berdasarkan wilayah kewenangannya. Hal tersebut sesuai dengan istilah yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodho*, artinya bahwa pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik pada bawahan, pengikut dan sekitarnya untuk bertindak dan mematuhi dari “apa” yang dianjurkan atau diberikan oleh para pemimpin, pejabat atau atassanya. Dalam hal ini mereka dapat berfungsi sebagai inovator dan fasilitator hingga dapat tercapai suatu perubahan sesuai yang direncanakan. Mereka merupakan tokoh awal permulaan pelaksanaan, yaitu mereka bersedia berkorban dengan menyediakan fasilitas lahan pertanian daripada kekayaanya, dalam bentuk kekayaan pribadi maupun lahan sebagai gaji yang berupa tanah bengkok atau sering disebut juga tanah lungguh, serta mampu mengelola tanah kas desa untuk dijadikan sebagai lahan percontohan. Dan oleh karena lahan tersebut digunakan sebagai lahan percontohan, berari baik keuntungan maupun resiko kerugian harus rela untuk menanggungnya. Kerugian terjadi bilamana lahan mengalami kegagalan panen akibat terserang hama dan sebagainya tidak sesuai

yang diharapkan dari proses proyek pilot project atau percontohan pertanian dalam penggunaan bibit unggul padi jenis baru tersebut.

Tingkatan kedua, yaitu pamong desa harus mampu berada ditengah, bersama-sama masyarakat desa terutama petani dalam melaksanakan anjuran dan kebijakan bidang pertanian yaitu dengan menggunakan produk bibit dari hasil penelitian badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah. Dalam hal ini pamong desa berada ditengah petani dengan tidak memandang status dan kedudukan dalam mengolah lahan persawahan. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pemikiran dan mempertimbangkan sistem atau cara yang tepat untuk diterapkan pada lahan pertanian di wilayah kewenangannya. Keberadaan tersebut sesuai dengan istilah *Ing Madya Mbangun Karso* artinya seorang pemimpin harus mampu berada di tengah atau didalam masyarakatnya untuk membentuk dan memberikan pemikiran atau kehendak yang tepat untuk mewujudkan keinginan agar tercapai sesuai rencana.

Tingkatan ketiga, pamong desa harus mampu dan bersedia menempatkan posisinya pada lapisan belakang, untuk memberikan dukungan, dorongan daripada masyarakat. Keberadaan tersebut terwujud karena pamong desa juga merupakan manusia yang wajar dengan berbagai kelemahan atau kekurangan dalam sikap perilaku, pengalaman dan pengetahuan dibidang pertanian. Mereka tidak dapat memaksakan keinginan atau kehendak pada masyarakat dengan kekuasaan yang dimilikinya dalam melaksanakan keputusan yang diberikan atasannya. Intinya bahwa walaupun pamong desa kurang ahli dalam pertanian tetapi harus tetap berusaha untuk memberikan hal yang terbaik untuk



masrakatnya, tidak meninggalkannya, sesuai dengan semboyan istilah *Tut Wuri Handayani*.

Dalam realita pelaksanaan proyek tersebut, juga terdapat keterlibatan dari pihak-pihak lain diantaranya; adanya pengaruh pemimpin informal desa, lembaga atau badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah seperti ; KUD, BUUD, BULOG dan sebagainya sebagai faktor pendukung keberhasilan program pertanian tersebut. Selain dari itu juga berkat adanya para petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari kecamatan dan kabupaten yang diwujudkan dalam bentuk Balai Pembangunan Masyarakat Desa, sekarang berubah nama menjadi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap kecamatan. Disamping itu juga adanya peranan dari pejabat pemerintahan daerah, Departemen Pertanian dengan petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta badan Bimbingan Massal (Bimas) Kabupaen Klaten.

2. Partisipasi atau tanggapan dari masyarakat pedesaan terutama petani dalam penggunaan bibit padi unggul nasional jenis baru yang ditanam petani, dimana sebelumnya menanam bibit padi jenis lokal yang memiliki ciri dan budaya tersendiri. Para petani bersedia menggunakan bibit baru tersebut tidak secara keseluruhan dalam waktu yang relatif cepat. Mereka bertindak secara bertahap dengan cara melihat hasil pada lahan percontohan, sehingga membutuhkan waktu lama dan pengaruh yang lebih besar dari para pelaku kebijakan seperti dari pengaruh pejabat pemerintahan seperi para pamong desa dan sebagainya.

Dalam menanggapi kebijakan peranian tersebut terdapat berbagai bentuk tanggapan diantaranya yaitu tanggapan secara positif atau setuju menerima,

tanggapan negatif atau menolak serta kelompok tidak ada tanggapan karena mereka tidak bertindak sebagai pelaku pertanian persawahan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat pedesaan terutama petani dan perangkat pemerintah di Kecamatan Delanggu terhadap proyek pertanian tani makmur Kabupatèn Klaten, penulis sedikit memberikan saran sebagai berikut;

Mengingat keterlibatan perangkat pemerintahan desa dalam proyek pertanian tersebut, mereka memiliki pengaruh yang cukup besar, maka pemerintah pusat seharusnya memberikan imbal balik yang sepiantasnya terutama petani, yaitu dengan mengadakan program kebijakan pertanian yang lebih baik dengan mempertimbangkan pada pencapaian kesejahteraan di pedesaan. Oleh karena pada saat ini masyarakat pedesaan merupakan jumlah terbesar dari seluruh penduduk di Indonesia.

Keberadaan petani yang masih miskin, tidak memiliki cukup modal untuk mengolah lahan persawahan mereka dengan lebih baik, memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Juga dalam memperbaiki saluran distribusi dan pemasaran bahan pangan memerlukan perhatian khusus agar tercapai keselarasan dan keseimbangan kebutuhan, proses pemerataan perekonomian bagi masyarakat di pedesaan.

Kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian haruslah ditujukan agar supaya janganlah menguntungkan orang-orang pribadi dan golongan tertentu, sehingga hasilnya dapat dinikmati dan menambah

pengetahuan, ketrampilan masyarakat pada umumnya. Selain itu kebijakan harus pula menghilangkan segala diskriminasi, menetralisasi segenap kepentingan politik. Akhirnya, hendaknya kebijakan di bidang pertanian oleh pemerintah pusat haruslah selalu tegas dan jelas, janganlah kebijakan tersebut menjadi teka-teki atau sumber spekulasi dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Dokumen

Laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten, tentang Hasil-Hasil Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten tahun 1969.

Memori Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Pertanian Rakyat, Kabupaten Dati II Klaten Tahun 1981.

Pemda Dati II Klaten, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Desa Pelita I dan Pelita II.

### Buku -Buku :

A.T Birowo. 1975. *Teknologi Pangan Untuk Pembangunan Desa*. Bandung: Institut Teknologi Bandung Press.

Annebooth. 1988. *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.

Anwar Adilogo. 1976. *Kaum Usaha Tani*. Bandung: Alumni.

Arbi Sanit (ed). 1983. *Strategi Pembangunan Yang Berawal Dari Desa*. Jakarta: Usaha Nasional.

Bayu Surianingrat. 1981. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Jakarta: Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri.

\_\_\_\_\_. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bechold, K,W. 1988. *Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Buddy Prasadja. 1982. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali Press.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Hanafi Abdillah (ed). 1987. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Surabaya: Usaha Nasional.

- Haryono. 1980. *Mekanisasi Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hayami, Yujiro. Kikuchi, Masao. 1987. *Dilema Ekonomi Desa, suatu pendekatan ekonomi terhadap perubahan kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- I Nyoman Baratha. 1982. *Desa Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartini Kartono. 1983. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kuntowijoyo. 1998. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- M. Karyadi. 1981. *Kepemimpinan (Leadership)*. Bogor: Politea.
- Mubyarto. 1983. *Politik Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mulyani Sutejo. 1987. *Pupuk Dan Cara Pemupukan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Penny, D.H. 1988. *Masalah Pembangunan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Popkin, S.L. 1979. *Rational Peasant, the political economy of Rural society in Vietnam*. Berkley: Universits of California Press.
- Sajogjo. William L. Collier (ed). 1986. *Budidaya Padi Di Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Sartono Kartodirdjo dalam Koentjoroningrat (ed). 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Selo Soemardjan. 1991. *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*. Yogyakarta: UGM Press.
- Soleman B. Taneko. 1990. *Struktur Dan Proses. suatu pengantar sosiologi pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syamsudin Abbas. 1997. *90 Tahun penyuluhan Pertanian Di Indonesia (1905-1995)*. Jakarta: Departemen Pertanian, Sekretariat Badan Pengendali Bimas.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Revolusi Hijau dengan Swasembada Beras dan Jagung*. Jakarta: Departemen Pertanian.

**Surat Kabar dan Majalah :**

A.T. Birowo. “Memanfaatkan Telur Emas Desa”. PRISMA No III April 1976.

Nasikun. “Dunia Ketiga; janji Revolusi Hijau dan masalah pengangguran di negara berkembang”. PRISMA No. 10 Oktober 1980 Tahun IX.

Ninuk M.P. “Ketahanan Pangan Bukan Cuma Peningkatan Produksi Beras” KOMPAS. tanggal 28 September 1965.

Raharno. “Kerjasama Tim, Karakteristik dan Strategi Penerapan”. MEDIATOR No I. Juli 2000.

Sardjana Totosoehardjo. “Informal Leader Dalam Peningkatan Produksi Pertanian”. Majalah Pertanian, ISN No. 0126 edisi 09 Tahun ke-X.

Sjamsoe’oed Sadjad. “Dari Bimas ke Desa Industri”. PRISMA No. 12 Tahun V Desember 1976.

## **DAFTAR INFORMAN**

1. Nama : Soemarno Mulyo Pramono.  
Usia : 64 tahun  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Butuhan, Kec. Delanggu 1972-1998.  
Alamat : Dersanan, Butuhan, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
  
2. Nama : Soekari H.S.  
Usia : 56 tahun  
Pekerjaan : Kepala Dusun I (bayan), Desa Butuhan, Kec. Delanggu tahun 1976-sekarang.  
Alamat : Dersanan, Butuhan, Kec. Delanggu, Kab. Klaten
  
3. Nama : H.Ratmo Panitro  
Usia : 66 tahun  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Jetis, Kec. Delanggu 1974-1998.  
Alamat : Ngablak, Jetis, Kec. Delanggu, Kab. Klaten
  
4. Nama : Ir. Hadi Soetomo  
Usia : 52 tahun  
Pekerjaan : Pegawai BIPP Kab. Klaten sekarang, dulu peg BPMD Delanggu tahun 1976-1982.  
Alamat : Jl. Veteran, Gading, Pasar Kliwon, Surakarta.
  
5. Nama : Harso Suwito.  
Usia : 67 tahun  
Pekerjaan : Buruh tani.  
Alamat : Merbung, Ds. Jetis, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
  
6. Nama : Soekiman.  
Usia : 57 tahun  
Pekerjaan : Petani.  
Alamat : Sritinon, Delanggu, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.

7. Nama : Soepandi.  
Usia : 54 tahun  
Pekerjaan : Pedagang pupuk dan eks penyalur benih resmi Dipertan.  
Alamat : Saedan, Tlobong, Delanggu.
8. Nama : Nursam Ubaidi.  
Usia : 38 tahun  
Pekerjaan : pegawai, bag. Program Perencanaan dan Pembangunan,  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Klaten.  
Alamat : Kalikotes. Klaten.
9. Nama : Darsono  
Usia : 45 tahun  
Pekerjaan : Pegawai Kecamatan Delanggu.  
Alamat : Kuncen, Delanggu, Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
10. Nama : Sunaryadi  
Usia : 54 tahun  
Pekerjaan : Pegawai BPIP, Dinas Pertanian Klaten.  
Alamat : Manjungan, Ngawen, Klaten.
11. Nama : Hudi Mustofa  
Usia : 70 tahun  
Pekerjaan : mantan Pamong Tani Desa (PTD) Ds. Jetis, Kec. Delanggu.  
Alamat : Ngablak, Jetis, Delanggu.
12. Nama : Ismani  
Usia : 40 tahun  
Pekerjaan : Kepala Urusan Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Ds Jetis, Kec. Delanggu.  
Alamat : Jetan, Jetis, Delanggu.



13. Nama : Purwanto  
Usia : 41 tahun  
Pekerjaan : Kepala Urusan Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Ds Jetis, Kec. Delanggu.  
Alamat : Jetan, Jetis, Delanggu.
14. Nama : Pawiro Sayono  
Usia : 58 tahun  
Pekerjaan : Petani dan Pedagang padi (*Tebasan*).  
Alamat : Butuhan, Butuhan, Delanggu
15. Nama : Soepandi  
Usia : 54 tahun  
Pekerjaan : Petani dan Pegawai Negri (guru).  
Alamat : Krenen, Bowan, Delanggu
16. Nama : Widodo  
Usia : 51 tahun  
Pekerjaan: Pedagang Beras dan Pengusaha Penggilingan Padi  
Alamat : Taman, Delanggu, Delanggu
17. Nama : Walidi  
Usia : 50 tahun  
Pekerjaan : Petani dan Kaur Agama (modin) Desa Banaran.  
Alamat : Kaliwingko, Banaran, Delanggu.
18. Nama : Welas  
Usia : 53 tahun  
Pekerjaan : Pedagang beras.  
Alamat : Jl. Stasiun (pasar Ngeseng), Gatak, Delanggu